[JPP] Submission Acknowledgement

1 pesan

Ikhsan <jurnal@utu.ac.id> 27 Mei 2022 01.10
Kepada: suadi@unimal.ac.id

Suadi Zainal:

Thank you for submitting the manuscript, "Urgensi Riset dan Penguatan Kebijakan Kewirausahaan dalam Melahirkan Model Usaha di Wilayah Bekas Konflik" to Jurnal Public Policy. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/author/submission/5539
Username: suadi76

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Ikhsan
Jurnal Public Policy
Terima Kasih

Jurnal Public Policy
http:http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy

Jurnal PUBLIC POLICY

#5539 Review

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors	Suadi Zainal
Title	The Urgency of Research and Strengthening Entrepreneurship Policies in Generating Business Models in Ex-Conflict Areas
Section	Articles
Editor	Zuhrizal Fadhly

Peer Review

Round 1

Review Version	5539-15905-2-RV.DOCX 2022-06-21
Initiated	2022-06-21
Last modified	2022-07-17
Uploaded file	Reviewer A 5539-16983-1-RV.DOCX 2022-07-12

Editor Decision

Decision	Accept Submission 2022-08-20
Notify Editor	Editor/Author Email Record 2022-08-20
Editor Version	5539-16404-1-ED.DOCX 2022-06-21 5539-16404-2-ED.DOCX 2022-07-17
Author Version	5539-17066-1-ED.DOCX 2022-07-18 DELETE 5539-17066-2-ED.DOCX 2022-07-25 DELETE
Upload Author Version	Pilih File Tidak ada file yang dipilih Upload

Jurnal Public Policy
p-ISSN: 2477-5738 I e-ISSN: 2502-0528 I DOI: 10.35308
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
(0655) 7110535 I +621260313742 I +6285277110911
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Available *online* at : http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy

Jurnal Public Policy

| ISSN (Print) 2477-5738 |ISSN (Online) 2502-0528|

JURNAL PUBLIC POLICY

Print ISSN : 2477-5738	Online ISSN : 2502-0528

PAPER REVIEWING FORM

(diisi oleh editor jurnal public policy):

Paper ID	:	**5539**
Judul	:	**Urgensi Riset dan Penguatan Kebijakan Kewirausahaan dalam Melahirkan Model Usaha di Wilayah Bekas Konflik**
Kode Reviewer	:	**6**

Mohon berikan penilaian pada artikel ini dengan cara memberi tanda (√) pada kolom skor penilaian serta uraikan pendapat Bapak/Ibu Dewan Pakar dalam kolom komentar.

Variabel Penilaian	Deskripsi	**Skor Penilaian (√) (0 = Buruk ….. 4 = Sangat Baik)**				
		0	**1**	**2**	**3**	**4**
Relevansi	Kesesuaian topik artikel dengan focus dan scope jurnal					√
Komentar:						
Kontribusi	Kualitas artikel ditinjau dari ide/gagasan dan keaslian (originality), kebaruan (novelty), dan keunikan					√
Komentar:						
Organisasi artikel	Bahasa yang digunakan, kejelasan isi artikel, dan kemudahan dipahami oleh pembaca					√
Komentar:						
Teknik Penyajian:						
		0	**1**	**2**	**3**	**4**
Judul	Judul Tepat, singkat, dan jelas melukiskan isi artikel				√	
Komentar:						
Abstrak bahasa inggris	Singkat, jelas dan lengkap menerangkan tujuan dan ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan, ringkasan hasil, dan simpulan				√	
Komentar:						
Pendahuluan					√	
Komentar:						
Tinjauan Referensi						√

https://doi.org/10.35308/xxxxx
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Some rights reserved

Komentar:						
Metode					√	
Komentar:						
Hasil dan Analisis						√
Komentar:						
Simpulan						√
Komentar:						
Referensi						√
Komentar:						

Rekomendasi untuk Jurnal Public Policy (ketikkan tanda √ di sebelah kiri pilihan rekomendasi)

	Naskah dapat diterima dan dimuat tanpa perubahan
√	Naskah dapat diterima dengan revisi minor
	Naskah dapat diterima dengan revisi mayor
	Naskah ditolak (tidak dapat dimuat)

Saran untuk penulis	
Saran untuk editor	

https://doi.org/10.35308/xxxxx

Urgensi Riset dan Penguatan Kebijakan Kewirausahaan dalam Melahirkan Model Usaha di Wilayah Bekas Konflik

ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00
Revised: March 00, 00
Accepted: March 00, 00
Available online: April 00, 00

KEYWORDS

Policy, Entrepreneurship, MSMEs, Conflict Actor, Peace

CORRESPONDENCE

Phone:
E-mail:

A B S T R A C T

The world of entrepreneurship contributes a lot to the economic growth of a regional area. In former conflict areas, entrepreneurship is a mechanism to facilitate prosperity and peace. The involvement of former conflict actors in micro, small and medium enterprises (MSMEs) provided them opportunities to enjoy peace dividends and repair the order of life damaged by prolonged conflict. Even so, failed MSMEs become a problem because it causes economic stagnation and has the opportunity to create new conflict. Therefore, this paper aims to analyze the importance of research and strengthening policies related to entrepreneurship in former conflict areas. This study was conducted in North Aceh District using a qualitative approach. The data collection process carried out observation, interviews and document studies. The empirical facts were analyzed by the stage of data reduction and data categorization, data display, and drawing conclusion. The results showed that one of the cause failure MSMEs developments is due to weak policies and regulations related to community business empowerment. This fact raised due to the policies that presented by the stakeholders were not based on research. Indeed, strengthening policies related to MSMEs can be done by making the results of studies and social mapping as the core basis. Thus, the development of the MSME model for former conflict actors in Aceh has effects on increasing welfare and maintaining sustainable peace.

PENDAHULUAN

Di banyak wilayah bekas konflik, kewirausahaan dipandang sebagai mekanisme untuk memfasilitasi kemakmuran dan perdamaian (Naudé, 2007). Memahami begitu krusialnya peran kewirausahaan, Pemerintah Aceh melalui badan perencanaan daerah telah menyusun Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Di antara aksi penting dalam inovasi tersebut adalah hadirnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaannya memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan peningkatan sumberdaya UMKM (Bappeda Aceh, 2015) sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang memuaskan kepada anggotanya serta kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar lokal dan global.

Pertumbuhan UMKM Aceh terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari situasi Aceh yang damai, dan banyaknya stimulan bantuan pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga donor kepada masyarakat Aceh, khususnya bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat korban konflik. Sebagian aktor elit konflik telah bertransformasi menjadi elit politik (Stange & Patock, 2010), kontraktor serta *rent seeker* untuk memperoleh keuntungan ekonomi pasca konflik (Aspinall, 2009; Hajad, 2019). Tidak jarang, kondisi tersebut berimplikasi pada terciptanya sistem patronase yang dikuasai oleh para mantan kombatan dalam berbagai program pembangunan dan ekonomi (Barron, Rahman, & Nugroho, 2013; Lee, 2020). Di sisi lain, juga banyak mantan kombatan dan masyarakat sipil yang kesulitan akses terhadap bantuan dari program pembangunan yang digelontorkan karena keterbatasan relasi politik yang dimiliki. Dengan demikian, *peace devident* tidak dirasakan secara merata dan berfungsi secara optimal dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan di Aceh (Sustikarini, 2019).

Sistem pembangunan ekonomi dan politik yang bersifat patronase di atas masih terus dipraktekkan sehingga meskipun begitu banyak modal usaha yang diberikan, tetap tidak berpengaruh signifikan pada pengurangan angka kemiskinan. Pada tingkatan tertentu, malah banyak terdapat kelompok kombatan yang mendapatkan akses bantuan modal, namun gagal dalam mengembangkan usahanya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kebijakan dan regulasi terkait

Comment [A1]: Tidak kapital diawal karena ti diikuti dengan keterangan tempat setelahnya

pemberdayaan usaha masyarakat. Kenyataan ini muncul akibat kebijakan-kebijakan yang dihadirkan para stakeholder di Indonesia pada umumnya tidak berbasis hasil penelitian. Hasil kajian dan riset belum menjadi pertimbangan utama dalam melahirkan kebijakan. Tarik ulur kepentingan antar aktor pembuat kebijakan, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi masih merajai siklus dan proses terciptanya kebijakan itu sendiri. Sejatinya, kebijakan unggul yang berkaitan dengan urusan publik harus terlahir dari riset yang dilakukan secara mendalam (Asmara, 2016).

Ada banyak faktor yang menyebabkan lebarnya jurang pemisah antara dunia penelitian dengan kebijakan, antara lain: (1) Pemahaman dan kesadaran para perumus kebijakan yang masih kurang terkait pentingnya keberadaan riset dalam proses *policy making*; (2) Persepsi yang keliru terhadap riset itu sendiri, seolah-olah dunia riset hanya berkaitan dengan dunia akademik; (3) Terbatasnya hasil riset yang layak dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan, baik secara kualitas maupun kuantitas; (4) Selama ini, kebanyakan penelitian hanya menjadi pelengkap prosedur formalitas saja dalam melahirkan kebijakan; (5) Hasil penelitian yang dilakukan belum terinventasisasi dengan baik sehingga sulit untuk diakses; dan (6) Minimnya diseminasi informasi hasil penelitian kepada para pihak perumus kebijakan (Noor & Setyawati, 2014). Kecenderungan ini berimplikasi pada lemahnya substansi dan impelementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian terdahulu (telah ditempatkan pada bagian urgensi riset UMKM)

Kajian ini dipandang penting sebagai pemantik diskusi ilmiah di kalangan para stakeholder kebijakan kewirausahaan (UMKM) yang ada di Aceh supaya kebijakan yang dihadirkan telah melalui proses kajian terlebih dahulu. Dengan demikian, keberadaan UMKM dapat memulihkan keadaan ekonomi mantan kombatan GAM yang dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mereka secara berkelanjutan. Kajian ini dapat dipandang sebagai kebutuhan mendesak sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi mantan kombatan karena jika diabaikan akan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja sebagai implikasi dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang berdampak pada instabilitas sosial.

METODE

Kajian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan fokus utama adalah kombatan GAM yang menjalankan usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, sementara data penunjang didapat dari kajian terhadap dokumen dan literatur yang relevan dengan topik. Penulis melakukan pengamatan di lokasi keberadaan UMKM dan melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM dari mantan kombatan. Dalam hal ini, penulis mendatangi UMKM yang pengelolanya melibatkan mantan kombatan GAM dengan terlebih dahulu menjajaki informasi awal dari masyarakat dan informan penghubung. Hal ini dilakukan agar peneliti tidak salah dalam menentukan informan.

Tentu saja, kajian ini tidak bermaksud untuk melahirkan kesimpulan yang sifatnya general sehingga hasil kajian tidak dapat merepresentasikan kondisi seluruh UMKM yang pengelolanya adalah mantan kombatan. Akan tetapi, kajian ini sebagai ruang diskusi yang dapat menggali pemahaman (*verstehen*) yang tentu saja akan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan praktek perumusan kebijakan (*policy making process*). Selanjutnya, data dianalis dengan model interaktif yaitu melalui tahapan reduksi data, kategorisasi data dan penyajian data yang berakhir pada penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM dan Kisah Singkat Dunia Usaha Eks Kombatan

Ragam Defenisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bukan saja di negara berkembang, tetapi juga berlaku di negara maju. Untuk kasus Indonesia sendiri, UMKM mampu menjadi solusi ketidakstabilan ekonomi kala krisis keuangan terjadi tahun 1997 dan krisis global pada 2008 silam (Tyas & Safitri, 2014). Badan usaha tersebut berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja serta pendistribusian hasil pembangunan (Kristiyanti, 2012). Oleh sebab itu, tidak mengherankan ketika David Mclelland menyebutkan bahwa sebuah negara masuk dalam kategori makmur apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah populasi penduduknya. Karakteristik wirausahaan yang sukses adalah mereka lebih proaktif, mereka sudah melakukan sesuatu sebelum mereka harus melakukannya; mereka menunjukkan karakteristik sindrom motivasi berprestasi; dan mereka memiliki komitmen terhadap orang lain (McClelland, 1987).

UMKM sendiri memiliki defenisi yang beragam. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UKM berdasarkan jumlah kuantitas tenaga kerja. Jika jumlah pekerja berkisar antara 2 sampai 19 orang, maka masuk dalam kategori usaha kecil. Sementara usaha menengah, jika jumlah tenaga kerja berada di angka 20 sampai dengan 99 orang (Winarni, 2019). Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, defenisi UMKM dijelaskan sebagai berikut:

> "(1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan" (Suci, 2017).

Selanjutnya, undang-undang tersebut menyebutkan kriteria UMKM pada pasal 6 sebagai berikut:

> "1) Kategori usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil jualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2) Kriteria Usaha Kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.

Comment [A6]: Pengulangan kata "pada", sebaiknya salahsatu dihilangkan saja

Comment [MOU7]: "Sekelumit kisah" bisa diganti dengan kata lain, misalnya dinamika? Atau kata yang lain

Comment [A2]: Untuk penulisan penomoran, sebaiknya dalam kurung. Contoh: (1) atau (a)

Comment [MOU3]: Penelitian terdahulu penti untuk menjelas gap penelitian ini.

Comment [A8]: Bubuhkan tanda koma setelah kata "menengah", untuk memisahkan anak kalima yang mendahului induk kalimat.

Comment [A9]: Untuk penomoran ini juga dibubuhkan di dalam kurung

Comment [A10]: Tidak kapital diawal

Comment [A11]: Dihilangkan saja, karena suc diwakili oleh tanda koma sehingga konjungsi tida diperlukan lagi

Comment [MOU4]: Penjelasan mengenai wawancara juga perlu dideskripsikan dan siapa sa yang telah diwancarai.

Comment [A5]: Jika ada perincian lebih dari d maka bubuhkan tanda koma sebelum konjungsi "Dan".

Comment [A12]: Tidak kapital diawal

https://doi.org/10.35308/xxxxx

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selain kekayaan tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan di angka Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan 3) kategori Usaha Menengah adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)".

Menurut Burns (2016) perusahaan kecil adalah entitas sosial yang berputar di sekitar hubungan pribadi. Mereka mendekati risiko dan ketidakpastian dengan cara tertentu yang kadang-kadang mungkin tampak jauh dari rasional. Karakteristik lainnya adalah mereka biasanya kekurangan uang tunai. Mereka tidak dapat mengumpulkan modal dengan cara yang sama seperti perusahaan besar. Kemudian perusahaan kecil cenderung beroperasi dalam satu pasar tunggal atau sejumlah pasar terbatas, mungkin menawarkan sejumlah produk atau layanan terbatas. Menurut Harini, Sudarijati, and Ashari (2016), untuk meningkatkan kinerja UMKM diperlukan keterlibatan para stakeholders seperti lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi, dan asosiasi usaha. Merujuk pada berbagai defenisi di atas, maka kelompok usaha yang dibangun oleh mantan eks kombatan yang penulis dapatkan di lapangan bisa digolongkan ke dalam UMKM.

Kisah Singkat Usaha Mantan Kombatan GAM di Aceh Utara

Perjanjian perdamaian (MoU Helsinki) pada 2005 menyelesaikan konflik politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia secara formal. Paska damai, pembangunan perdamaian yang tidak tepat telah menimbulkan konflik horizontal di Aceh; konflik antar mantan elit GAM; konflik antar elit dan mantan prajurit; dan di antara kelompok masyarakat yang terbagi menurut garis etnis dan garis ekonomi (Ansori, 2012; Barron et al., 2013; Quayle). Namun demikian harus diakui, damai Aceh yang sudah berlansung selama satu setengah dekade berdampak pada pertumbuhan ekonomi, walaupun dipandang lambat.

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mengarah pada pengurangan kemiskinan yang berkontribusi pada perdamaian. Oleh sebab itu, tidak dapat disangkal bahwa kemampuan bisnis untuk menghasilkan peluang kerja dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang mampu mencegah konflik terulang lagi (Chang & Rynhart, 2016). Salah satu jalan untuk pertumbuhan ekonomi adalah melalui pengembangan kewirausahaan.

Mantan eks kombatan merintis usaha dengan modal yang berasal dari individu dan bantuan pemerintah. Hanya saja, UMKM yang dibangun oleh eks kombatan dengan modal yang bersumber dari eksternal kelompok (bukan bersifat swadaya) sering berujung dengan kegagagalan. Sebagaimana dua UMKM di wilayah Aceh Utara yang dinakhodai oleh mantan eks kombatan berikut ini. Pertama, UMKM "Muda Mandir" yang bergerak di bidang usaha pertanian bawang merah dan cabai di Desa Riseh Tunong, Aceh Utara. Kelompok tersebut dibentuk oleh mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka pada awal tahun 2020. Pendirinya adalah Muhazir dan Abdurrahman. Anggota kelompok terdiri dari masyarakat korban konflik, sementara pengelolanya adalah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut pengelola UMKM, modal awal pembentukan kelompok ini didapat dari program bantuan pemerintah melalui alokasi dana Dewan Perwakilan Rakyar Aceh (DPRA). Kelompok ini hanya berjalan selama satu tahun dan kemudian hilang tak berjejak.

Kedua, Kelompok Usaha Penggemukan Kambing di Gampong Lang Nibong Matang Sijuek Barat, Kabupaten Aceh Utara. Kelompok ini mendapatkan bantuan dari Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara. Bantuan yang diberikan berupa ternak kambing untuk penggemukan. Kelompok yang lahir pada tahun 2018 juga dikelola oleh mantan kombatan GAM dan masyarakat biasa. Terdapat sekitar 20 anggota kelompok yang terdaftar di bawah kelompok "Makmu Ternak" tersebut. Setiap anggota kelompok menerima bantuan 2 ekor kambing jantan. Dalam pelaksanaannya, kelompok ini mendapat bimbingan petugas yang didatangkan dari dinas terkait selama tiga hari. Permasalahannya, ketika bibit kambing diberikan, para anggota ini mengaku menerima kambing di bawah standar penggemukan. Jelas, para anggota kelompok kecewa dengan mekanisme bantuan seperti ini. Apalagi mereka hanya menerima kambing saja, tanpa ada biaya operasional lainnya yang juga diperlukan selama proses penggemukan, seperti obat-obatan, pakan, dan perawatan kandang yang semuanya membutuhkan biaya tambahan. Dalam perjalanannya, kambing yang menjadi cikal bakal bantuan ini ada yang menderita sakit, bahkan mengalami kematian. Menurut pendamping bantuan, bantuan bibit kambing yang diberikan hanya bertahan dua bulan, setelah itu sudah tidak ditemukan lagi, baik karena faktor kematian, maupun dijual oleh penerima bantuan.

Dari dua cerita usaha di atas, dapat dijelaskan bahwa gagalnya pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dlatarbelakangi oleh beberapa faktor berikut ini: (1) Terbatasnya modal yang diberikan; (2) Minimnya sumber daya manusia terkait pengelolaan usaha yang diberikan; (3) Bantuan yang diberikan tidak melalui kajian sehingga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan *passion* penerima; (4) Infrastruktur usaha yang tidak mendukung; (5) Pengelola yang tidak disiplin sehingga tidak memiliki rasa tangung jawab terhadap bantuan yang diterima; (6) Lemahnya kontrol dan evaluasi dari pihak pemberi bantuan; dan (7) Lemahnya jaringan pemasaran yang dimiliki. Untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalisasi kegagalan maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan kebijakan terkait tata kelola UMKM.

Comment [A13]: Akan lebih padu jika ditambahkan kata -kan

Comment [A14]: Ini juga dibubuhkan tanda kurung

Urgensi Riset UMKM di Aceh dalam Perspektif Studi Perdamaian

Sebagian mantan aktor konflik kelas menengah dan kelas bawah telah bertransformasi menjadi pengusaha kecil dan menengah bersama masyarakat kreatif lainnya di desa mereka. Namun demikian, belum terlihat adanya penelitian yang fokus pada keterlibatan mantan aktor konflik sebagai pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di antara penelitian yang berkaitan dengan UMKM yang memfokuskan pada aspek ekonomi, yaitu penelitian Hafni and Rozali (2015)

yang berjudul "Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia"; Penelitian Affiqah and Fuadi (2019) dengan judul "Penerapan Metode Target Costing dalam Perencanaan Biaya Produksi untuk Optimalisasi Laba pada UMKM Dendeng Sapi Aceh di Banda Aceh"; penelitian Bahri and Rahmawaty (2019) yang mengangkat tema "Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dalam Menentukan Harga Jual Produk (Studi Empiris Pada UMKM Dendeng Sapi di Banda Aceh)"; Fadzillah (2019) dengan judul "Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM"; Kajian Maulina (2020) dengan judul "Analisis Faktor Determinan Minat Muslimpreneur dalam Menjalankan UMKM di Banda Aceh"; Riset Murezeki (2017) dengan tema "Analisis Peningkatan dan Pengembangan Produksi Kopi dari Pasca Panen di UMKM "Bergendaal Koffie" Kabupaten Bener Meriah Aceh"; kajian Nasir, Putri, Lianti, and Dewi (2018) "Produk Unggulan dan Implimentasinya di Kabupaten Aceh Utara"; Ridha and Putri (2017) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kerajinan Tas Aceh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara; Yusrilsya and Mahalli (2013) Peranan CSR PT. Arun NGL dalam Pengembangan UKM di Aceh Utara"; dan kajian yang dilakukan oleh Jullimursyida (2018) dengan judul "Pembentukan Klaster Bisnis dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Komoditi Karet di Kabupaten Aceh Utara".

Jika ditelusuri lebih lanjut, kajian-kajian tersebut tidak ada yang menjelaskan keterlibatan mantan aktor konflik dalam UMKM. Selain itu, penelitian-penelitian mengenai UMKM sebelumnya lebih menfokuskan pada produksi, pemasaran serta laba dan penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi. Akibatnya, kajian UMKM di Aceh telah didominasi oleh perspektif ekonomi, dan belum terdapat kajian yang fokus pada pengembangan UMKM yang dilakukan oleh mantan aktor konflik. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi mantan GAM, di antaranya penelitian Yunus, Zainal, Jalil, and Abubakar (2015) yang berjudul "*Local Economic Empowerment* of the *Ex-GAM* (*Gerakan Aceh Merdeka / Free Aceh Movement Former Combatant*) *and Conflict Victims through* Palm Oil Plantation Aid *Program in East Aceh*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Bantuan Kelapa Sawit di Aceh Timur diperuntukkan kepada kelompok yang terdiri dari mantan GAM, masyarakat korban konflik dan masyarakat biasa. Program ini telah berdampak positif pada peningkatan ekonomi lokal, terutama pendapatan petani dan masyarakat sekitar lahan perkebebunan.

Selanjutnya Ridhwan, Fauzi, and Daud (2015) dalam kajiannya "Transisi Ekonomi Politik GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM" yang menyatakan bahwa pada masa *peace making*, pendapatan mereka dihasilkan dari sumbangan suka rela masyarakat, *pajak nanggroe*, sumbangan pengusaha (enterpreneur) serta dari pejabat. Pada fase *peace keeping*, sebagian mereka mendapat pendapatan dari pekerjaan sebagai repsentatif dari GAM di AMM, dan sebagian lainnya mendapat bantuan dari pemerintah sebagai kompensasi damai Aceh. Selanjutnya pada masa *peace building* mereka memperoleh ekonomi dari pemberian proyek fisik oleh 'Pemerintahan GAM' serta program pemberdayaan ekonomi melalui koperasi dan LSM, seperti pemberian lahan hutan garap.

Berkaitan dengan koperasi dan lahan garap atau perkebunan, Nazaruddin, Sukmawati, and Nasution (2016) dalam kajiannya "*Reintegration and Socio-Economic Transformation For Ex Combatants of The Free Aceh Movement (GAM) Post-Conflict Era in North Aceh-Indonesia*", menyatakan bahwa lahirnya Koperasi Bumoe Tari sebagai bentuk usaha patungan perkebunan kelapa sawit, disebabkan oleh: tidak adanya program nyata dari pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan mantan kombatan GAM dan korban konflik; muncul kesadaran kolektif mereka untuk merancang kesejahteraan bagi mereka, korban konflik, anak yatim konfik dan masyarakat marginal; dan panggilan tanggung jawab moral pimpinan GAM wilayah Sagoe. Eksistensi koperasi ini di antaranya ditentukan oleh sistem kepemimpinan yang demokratis, solidaritas dan tanggung jawab yang dibingkai dengan sistem manajemen komando gaya militer GAM.

Sedikit berbeda dengan Nazaruddin, et.al (2016), Tibrani and Ubaidullah (2019) melalui kajiannya "Peran Komite Peralihan Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM", menyebutkan bahwa program kesejahteraan bagi mantan kombatan telah dilaksanakan melalui mekanisme pengembangan ekonomi, pendidikan, dan politik di bawah program Komite Peralihan Aceh (KPA). Selain itu, KPA juga berfungsi sebagai mediator antara mantan kombatan GAM dengan elit formal pemerintah dalam hal menjaga kepentingan-kepentingan GAM dan korban konflik Aceh. Hal ini sejalan dengan Hajad (2019) dalam kajiannya "Peran Mantan Kombatan GAM dalam Sektor Ekonomi Pasca Konflik", ia menyebutkan bahwa pendapatan ekonomi mantan kombatan GAM setelah konflik diperoleh dengan menjadi *rent seeker* (perantara atau agen) proyek pemerintah. Mereka bekerja dengan memanfaatkan jaringan kekuasaan GAM untuk menuju ke sumber ekonomi, baik itu melalui lobi, negosiasi, dan bahkan intimidasi.

Dari sekian banyak penelitian di atas, tidak ada yang menjelaskan bentuk dan pengembangan UMKM mantan aktor konflik (GAM), baik dari kalangan kombatan maupun sipil, kecuali Ridhwan *et.al* yang menyinggung sumber ekonomi mantan GAM melalui Koperasi dan LSM, namun mereka tidak menjelaskan koperasi dan LSM apa, serta bagaimana usaha yang dijalankan oleh mantan GAM. Sementara Nazaruddin et.al yang menjelaskan secara sepesifik mengenai koperasi, fokusnya adalah pada motivasi mantan GAM dalam mengembangkan koperasi. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa belum ada satu kajian yang menjelaskan bentuk-bentuk UMKM yang melibatkan mantan GAM dan pola relasi yang dibangun untuk pengembangan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, kajian-kajian yang bersifat multi disiplin penting untuk dilakukan sebagai usaha menemukan model usaha yang sesuai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mantan aktor konflik. Di samping itu, kajian-kajian yang dilakukan nantinya juga harus dapat menjelaskan pertumbuhan UMKM yang melibatkan bekas aktor konflik Aceh, terutama kajian studi perdamaian yang melibatkan multi disiplin ilmu pengetahuan dengan menempatkan program ekonomi dalam proses reintegrasi mantan aktor konflik. Jika hanya menggunakan perspektif tunggal, misalnya perspektif sosiologis, kajian yang dihasilkan

Comment [A15]: Tidak kapital diawal, karena tidak diikuti keterangan tempat setelahnya

Comment [A16]: Penulisan kata "di" dipisah, karena "di" berperan sebagai kata depan. Dan "antaranya" berperan sebagai kata nomina.

Comment [A17]: Pengulangan kata "yang", sebaiknya salahsatu dihilangkan atau diganti deng padanan kata lainnya

Comment [A18]: Pengulangan kata "dan", sebaiknya salahsatu diganti dengan padanan kata lainnya

https://doi.org/10.35308/xxxxx

hanya mampu menganalisis perkembangan UMKM dan pola relasinya dengan para stakeholder. Dengan demikian, dapat diukur perkembangan dan potensi keberlanjutannya secara komprehensif. Penelitian semacam ini dipandang penting sebagai basis kebijakan pemberdayaan ekonomi pasca konflik untuk meminimalisasi pontensi muncul kembali konflik akibat ketimpangan ekonomi dan relasi sosial dalam masyarakat.

Pentingnya Penguatan Kebijakan Kewirausahaan yang Menguatkan Perdamaian

Tidak dapat dibantahkan bahwa UKM mendorong penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, membangkitkan kembali institusi dan membangun kembali ekosistem ekonomi adalah salah satu prioritas pertama rekonstruksi setelah pertempuran berakhir. Menurut U.S. Agency for International Development, 5 persen guncangan ekonomi negatif dapat meningkatkan risiko perang saudara 50 persen di negara-negara rapuh. Walaupun kewirausahaan bukanlah 'obat mujarab' untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi inisiatif yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan — terutama pertumbuhan UMKM — dapat mendorong stabilitas dan pembangunan di negara-negara yang terkena dampak konflik. Oleh sebab itu, bagi mereka yang mempromosikan perdamaian dan kemakmuran, mendukung kewirausahaan dan investasi cerdas dalam pertumbuhan UMKM, adalah satu keharusan dan mesti dijadikan komponen penting dari setiap strategi rekonstruksi pasca perang (Lemmon, 2012).

Tiga kondisi yang mempengaruhi keadaan kewirausahaan pasca konflik, yaitu kondisi sosio-politik, ekonomi, dan hukum (Djip, 2014). Untuk itu, secara umum, beberapa kunci kebijakan untuk pembangunan ekonomi adalah: 1) Kebijakan ekonomi makro yang sehat (kerangka fiskal, moneter, dan peraturan); 2) Penguatan institusi yang dibutuhkan untuk ekonomi pasar yang dinamis; dan 3) Dukungan entitas ekonomi untuk pembangunan sektor swasta. Sementara secara khusus di negara-negara dalam transisi pasca-konflik, pemerintah daerah dan lembaga donor dalam merevitalisasi ekonomi lokal yang rusak perlu melakukan kebijakan ekonomi yang dapat: 1) Mengembangkan infrastruktur ekonomi dasar dan mengatur sektor swasta; 2) Mengembangkan pasar kredit; 4) Merangsang investasi asing serta mempromosikan ekspor; dan 4) Mengembangkan sumber daya manusia (Kusago, 2005). Dengan demikian, persoalan atau kesulitan yang sering dihadapi pengusaha (UMKM) untuk tumbuh berkembang dapat teratasi, seperti kesulitan menemukan modal, pasar, dan jaringan yang diperlukan untuk menumbuhkan dan memperluas usaha mereka. Banyak pemilik UMKM juga tidak memiliki keterampilan bisnis dasar, seperti pencatatan, pemasaran, dan penempatan produk (Lemmon, 2012).

Lebih lanjut, secara khusus pengembangan UMKM harus ditempatkan dalam proses reintegrasi jangka panjang untuk menjamin kesejahteraan mantan aktor konflik secara ekonomi, sosial, dan politik. Reintegrasi ekonomi dapat berupa memberikan bantuan dan akses ke pekerjaan melalui pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, dukungan usaha mikro, kegiatan pembangunan pedesaan, dan promosi pekerjaan. Ini menyiratkan kemandirian finansial mantan gerilyawan melalui pekerjaan yang produktif dan layak (Office, 2010). Hal ini menjelaskan bahwa UMKM di wilayah bekas konflik berfungsi sebagai mekanisme reintegrasi ekonomi jangka panjang bagi mantan gerilyawan.

Reintegrasi terdiri dari reintegrasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ini adalah reinsersi. Ini terdiri dari periode awal ketika mantan gerilyawan datang ke bekas keluarga atau komunitas mereka. Seringkali mereka diberikan barang-barang kebutuhan rumah tangga, tanah, suplemen makanan, dan bahan-bahan perumahan. Sedangkan reintegrasi adalah proses yang panjang untuk memasukkan mantan gerilyawan dan keluarganya ke dalam masyarakat sipil dan mencapai kemandirian finansial melalui kegiatan produktif. Reintegrasi dapat dikategorikan menjadi dua elemen yang saling terkait: sosial dan ekonomi harus berjalan secara paralel. Ada dua pendekatan untuk reintegrasi; obyektif dan luas. Yang pertama adalah menghilangkan potensi ancaman terhadap keamanan publik, berurusan langsung dengan kelompok sasaran mantan gerilyawan dan anggota keluarga mereka serta kelompok rentan lainnya seperti pemuda pengangguran, pengungsi internal, dan pengaruh lain yang mengganggu kestabilan masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan komunitas. Ini berkaitan dengan masalah sebagai bagian dari program pembangunan daerah terpadu, rekonstruksi, dan reintegrasi. Program tersebut berfokus pada masyarakat dengan persentase penerima manfaat yang lebih besar daripada penerima manfaat itu sendiri. (Body & Brown, 2005).

Berdasarkan uraian konseptual tersebut, dapat dipahami bahwa jika pengembangan UMKM yang melibatkan mantan aktor konflik di Aceh dapat dipadukan dalam rencana pembangunan Aceh, maka sangat berpotensi perdamaian Aceh yang negatif segera menuju kepada perdamaian positif/berkelanjutan di mana keuntungan perdamaian dan kesejahteraan dapat terdistribusi secara adil dan merata. Hal ini sekaligus berfungsi memperbaiki program reintegrasi pada awal perdamaian yang dinilai belum mampu mengkonsolidasi perdamaian Aceh. Di antaranya disebabkan oleh: (1) Ketidakjelasan mengenai tujuan keseluruhan program reintegrasi, yang menyebabkan fokusnya terbatas pada integrasi ekonomi, dan pada keluaran daripada hasil; (2) Terlalu banyak penekanan pada pendekatan reintegrasi individu dan berbasis kompensasi. Pendekatan ini biasanya digunakan hanya untuk periode reinsertion awal; dan (3) Bantuan reintegrasi belum diarusutamakan ke dalam program pemerintah dan donor yang lebih luas, juga ke dalam strategi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sumber daya Pemerintah Aceh yang sangat melimpah belum dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan perdamaian melalui program dan kebijakan pembangunan (Hillman, 2011; Utomo, Hadi, & Nur Djuli, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan perjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dunia usaha UMKM jelas berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam pembangunan perdamaian, UMKM dapat merekoveri ekonomi masyarakat yang rusak akibat konflik. Bahkan melampaui itu, UMKM dapat dijadikan sebagai satu mekanisme lunak untuk mentransformasi aktor konflik menjadi aktor perdamaian. Namun demikian, untuk mengembangkan satu model UMKM yang tepat bagi mantan aktor konflik di Aceh memerlukan satu kajian multidisiplin

Comment [A22]: Jika sudah ada konjungsi "yang" maka tidak perlu ditambahkan tanda koma begitupun sebaliknya.

Comment [A23]: Pengulangan kata "Dan"

Comment [A24]: Sebaiknya kata ini digunaka padanan kata lainnya agar kalimat ini efektif

Comment [A19]: Bubuhkan tanda koma sebel konjungsi "dan" jika terdapat perincian lebih dari

Comment [A25]: Penulisannya "di" dipisah

Comment [A20]: Tidak kapital diawal

Comment [A21]: Pengulangan kata "dan", sebaiknya salahsatu diganti dengan padanan kata lainnya
Contoh: serta

Comment [A26]: Pengulangan kata "dan", sebaiknya salahsatu diganti dengan padanan kata lainnya yang sesuai dengan yang dibutuhkan kali

yang mendalam terlebih dahulu, mengingat banyak kajian selama ini lebih didominasi oleh perspektif ekonomi. Selain itu, kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh dalam melakukan pembangunan ekonomi paska konflik hendaknya mengarusutamakan UMKM yang sensitif damai, di mana struktur dan nilai-nilai ekonomi dapat mendorong keterlibatan mantan aktor konflik dalam pengembangan UMKM yang berkontribusi terhadap pembangunan perdamaian berkelanjutan.

Di samping itu, agar keberadaan UMKM menjadi salah satu media peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menguatkan pembangunan perdamaian, maka beberapa poin penting berikut ini patut diperhatikan secara komprehensif, yaitu: (1) Kebijakan yang dihadirkan oleh para stakeholder harus berbasis pada kajian riset lapangan terlebih dahulu, sehingga jenis usaha yang diberikan sesuai dengan *passion* dan keahlian penerima bantuan; (2) Pihak pemberi bantuan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga bantuan yang diberikan selalu berada dalam kontrol; (3) Pihak pemberi bantuan harus melakukan pendampingan sehingga sumber daya manusia pengelola juga ikut ter-*upgrade*, dan (4) Meningkatkan rasa saling percaya antar elemen yang berkaitan sehingga terbangun sistem yang kokoh dan terstruktur.

REFERENSI

Affiqah, C., & Fuadi, R. (2019). Penerapan Metode Target Costing dalam Perencanaan Biaya Produksi untuk Optimalisasi Laba pada UMKM Dendeng Sapi Aceh di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *4*(2), 317-324.

Ansori, M. (2012). From insurgency to bureaucracy: Free Aceh movement, Aceh party and the new face of conflict. *Stability: International Journal of Security and Development*, *1*(1).

Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *1*(1), 37-46.

Aspinall, E. (2009). Combatants to contractors: the political economy of peace in Aceh. *Indonesia*(87), 1-34.

Bahri, R., & Rahmawaty, R. (2019). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual Produk (Studi Empiris Pada Umkm Dendeng Sapi Di Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *4*(2), 344-358.

Barron, P., Rahman, E. A., & Nugroho, K. (2013). *The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance: The Case of Aceh, Indonesia*: Asia Foudation.

Body, T., & Brown, S. (2005). Reintegration of ex-combatants through micro-enterprise: An operational framework. *CPR Network: the Pearson Peacekeeping Centre*.

Burns, P. (2016). *Entrepreneurship and small business*: Palgrave Macmillan Limited.

Chang, J. H., & Rynhart, G. (2016). *Enterprise creation, employment and decent work for peace and resilience the role of employer and business membership organizations in conflict zones in Asia*. Retrieved from

Djip, V. (2014). Entrepreneurship and SME development in post-conflict societies. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*.

Fadzillah, N. (2019). *Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM*. UIN Ar-raniry Banda Aceh,

Hafni, R., & Rozali, A. (2015). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (umkm) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan*, *15*(2), 78163.

Hajad, V. (2019). PERAN MANTAN KOMBATAN GAM DALAM SEKTOR EKONOMI PASCA KONFLIK. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, *7*(1), 59-79.

Harini, S., Sudarijati, S., & Ashari, I. (2016). Pengaruh Keterlibatan Stakeholders Terhadap Kinerja Umkm. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, *7*(1).

Hillman, B. (2011). The policy-making dimension of post-conflict governance: the experience of Aceh, Indonesia. *Conflict, Security & Development*, *11*(5), 533-553.

Jullimursyida, G. (2018). Cek Plagiat Buku Referensi; ANALISIS MODEL PEMBENTUKAN KLASTER BISNIS DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KOMODITI KARET DI KABUPATEN ACEH UTARA.

Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. *Majalah Ilmiah Informatika*, *3*(1), 63-89.

Kusago, T. (2005). Post-conflict pro-poor private-sector development: The case of Timor-Leste. *Development in Practice*, *15*(3-4), 502-513.

Lee, T. (2020). Political orders and peace-building: ending the Aceh conflict. *Conflict, Security & Development*, *20*(1), 115-139.

Lemmon, G. T. (2012). *Entrepreneurship in postconflict zones*: Council on Foreign Relations New York.

Maulina, Y. (2020). ANALISIS FAKTOR DETERMINAN MINAT MUSLIMPRENEUR DALAM MENJALANKAN UMKM DI BANDA ACEH. *ETD Unsyiah*.

McClelland, D. C. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. *The journal of creative behavior*.

Murezeki, Y. W. (2017). Analisis Peningkatan dan Pengembangan Produksi Kopi dari Pasca Panen di UMKM" Bergendaal Koffie" Kabupaten Bener Meriah Aceh.

Nasir, M., Putri, Y. T., Lianti, L., & Dewi, N. (2018). PRODUK UNGGULAN DAN IMPLIMENTASINYA DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *20*(2).

Naudé, W. (2007). *Peace, prosperity and pro-growth entrepreneurship*: WIDER Discussion Paper.

Nazaruddin, M., Sukmawati, C., & Nasution, A. A. (2016). *Reintegration And Socio-Economic Transformation For Ex Combatants Of The Free Aceh Movement (Gam) Post-Conflict Era In North Aceh-Indonesia*. Paper presented at the 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016).

Noor, I. R., & Setyawati, L. (2014). Pemberdayaan UMKM: Catatan Reflektif Hasil Meta Riset. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 39-58.

Office, I. L. (2010). Socio-Economic Reintegration of Ex-combatants: Guidelines. In: ILO Geneva.

Quayle, L. Subnational conflict mitigation and civil society: Networks, innovations, and the uncertain place of ASEAN.

Comment [A27]: Sebaiknya dimasukkan dala
tanda kurung.
Contoh: (1)….; (2)…..

https://doi.org/10.35308/xxxxx

Ridha, A., & Putri, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kerajinan Tas Aceh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *1*(1), 86-93.

Ridhwan, M., Fauzi, F., & Daud, S. (2015). TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM. *Fikiran Masyarakat*, *3*(2), 88-96.

Stange, G., & Patock, R. (2010). From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *29*(1), 95-120.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, *6*(1), 51-58.

Sustikarini, A. (2019). Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, *7*(2), 99-121.

Tibrani, T., & Ubaidullah, U. (2019). Peran Komite Peralihan Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, *4*(4).

Tyas, A. A. W. P., & Safitri, V. I. (2014). Penguatan sektor UMKM sebagai strategi menghadapi MEA 2015. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, *5*(1), 17895.

Utomo, M., Hadi, S., & Nur Djuli, M. (2009). Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh: Multistakeholder Review of Post-conflict Programming in Aceh. *World Bank Group and Dutch Ministry of Foriegn Affairs, Jakarta*.

Winarni, W. (2019). MEMBANGUN PEREKONOMIAN RAKYAT DENGAN KEWIRAUSAHAAN UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Assholeh*, *8*(1), 26-38.

Yunus, S., Zainal, S., Jalil, F., & Abubakar, M. (2015). Local Economic Empowerment of the Ex-Gam (Gerakan Aceh Merdeka/Free Aceh Movement Former Combatant) and Conflict Victims through Palm Oil Plantation Aid Program In East Aceh. *International Journal of Humanities and Social Science*, *5*(10 (1)), 119-124.

Yusrilsya, M., & Mahalli, K. (2013). Peranan CSR PT. Arun Ngl Dalam Pengembangan UKM Di Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, *1*(11), 14768.

Available *online*at : http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy

Jurnal Public Policy

| ISSN (Print) 2477-5738 |ISSN (Online) 2502-0528|

Urgensi Riset dan Penguatan Kebijakan Kewirausahaan dalam Melahirkan Model Usaha di Wilayah Bekas Konflik

Suadi Zainal[1]

[1]*Prodi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 24351, Indonesia*

ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00
Revised: March 00, 00
Accepted: March 00, 00
Available online: April 00, 00

KEYWORDS

Policy, Entrepreneurship, MSMEs, Conflict Actor, Peace

CORRESPONDENCE

Phone: +6281263231414

E-mail: suadi@unimal.ac.id

A B S T R A C T

The world of entrepreneurship contributes a lot to the economic growth of a regional area. In former conflict areas, entrepreneurship is a mechanism to facilitate prosperity and peace. The involvement of former conflict actors in micro, small and medium enterprises (MSMEs) provided them opportunities to enjoy peace dividends and repair the order of life damaged by prolonged conflict. Even so, failed MSMEs become a problem because it causes economic stagnation and has the opportunity to create new conflict. Therefore, this paper aims to analyze the importance of research and strengthening policies related to entrepreneurship in former conflict areas. This study was conducted in North Aceh District using a qualitative approach. The data collection process carried out observation, interviews and document studies. The empirical facts were analyzed by the stage of data reduction and data categorization, data display, and drawing conclusion. The results showed that one of the cause failure MSMEs developments is due to weak policies and regulations related to community business empowerment. This fact raised due to the policies that presented by the stakeholders were not based on research. Indeed, strengthening policies related to MSMEs can be done by making the results of studies and social mapping as the core basis. Thus, the development of the MSME model for former conflict actors in Aceh has effects on increasing welfare and maintaining sustainable peace.

PENDAHULUAN

Di banyak wilayah bekas konflik, kewirausahaan dipandang sebagai mekanisme untuk memfasilitasi kemakmuran dan perdamaian (Naudé, 2007). Memahami begitu krusialnya peran keirausahaan, Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Daerah telah menyusun Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Diantara aksi penting dalam inovasi tersebut adalah hadirnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaannya memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan peningkatan sumberdaya UMKM (Bappeda Aceh, 2015) sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang memuaskan kepada anggotanya serta kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar lokal dan global.

Pertumbuhan UMKM Aceh terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari situasi Aceh yang damai, dan banyaknya stimulan bantuan pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga donor kepada masyarakat Aceh, khususnya bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat korban konflik. Sebagian aktor elit konflik telah bertransformasi menjadi elit politik (Stange & Patock, 2010), kontraktor serta *rent seeker*

https://doi.org/10.35308/xxxxx
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Some rights reserved

untuk memperoleh keuntungan ekonomi pasca konflik (Aspinall, 2009; Hajad, 2019). Tidak jarang, kondisi tersebut berimplikasi pada terciptanya sistem patronase yang dikuasai oleh para mantan kombatan dalam berbagai program pembangunan dan ekonomi (Barron, Rahman, & Nugroho, 2013; Lee, 2020). Di sisi lain, juga banyak mantan kombatan dan masyarakat sipil yang kesulitan akses terhadap bantuan dari program pembangunan yang digelontorkan karena keterbatasan relasi politik yang dimiliki. Dengan demikian, *peace devident* tidak dirasakan secara merata dan berfungsi secara optimal dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan di Aceh (Sustikarini, 2019).

Sistem pembangunan ekonomi dan politik yang bersifat patronase di atas masih terus dipraktekkan sehingga meskipun begitu banyak modal usaha yang diberikan, tetap tidak berpengaruh signifikan pada pengurangan angka kemiskinan. Pada tingkatan tertentu, malah banyak terdapat kelompok kombatan yang mendapatkan akses bantuan modal, namun gagal dalam mengembangkan usahanya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kebijakan dan regulasi terkait pemberdayaan usaha masyarakat. Kenyataan ini muncul akibat kebijakan-kebijakan yang dihadirkan para stakeholder di Indonesia pada umumnya tidak berbasis hasil penelitian. Hasil kajian dan riset belum menjadi pertimbangan utama dalam melahirkan kebijakan. Tarik ulur kepentingan antar aktor pembuat kebijakan, baik itu kepentingan politik maupun eknomi masih merajai siklus dan proses terciptanya kebijakan itu sendiri. Sejatinya, kebijakan unggul yang berkaitan dengan urusan publik harus terlahir dari riset yang dilakukan secara mendalam (Asmara, 2016).

Ada banyak faktor yang menyebabkan lebarnya jurang pemisah antara dunia penelitian dengan kebijakan, antara lain: 1) Pemahaman dan kesadaran para perumus kebijakan yang masih kurang terkait pentingnya keberadaan riset dalam proses *policy making*; 2) Persepsi yang keliru terhadap riset itu sendiri, seolah-olah dunia riset hanya berkaitan dengan dunia akademik; 3) Terbatasnya hasil riset yang layak dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan, baik secara kualitas maupun kuantitas; 4) Selama ini, kebanyakan penelitian hanya menjadi pelengkap prosedur formalitas saja dalam melahirkan kebijakan; 5) Hasil penelitian yang dilakukan belum terinventasisasi dengan baik sehingga sulit untuk diakses; dan 6) Minimnya diseminasi informasi hasil penelitian kepada para pihak perumus kebijakan (Noor & Setyawati, 2014). Kecenderungan ini berimplikasi pada lemahnya substansi dan impelementasi kebijakan di lapangan.

Kajian ini dipandang penting sebagai pemantik diskusi ilmiah di kalangan para stakeholder kebijakan kewirausahaan (UMKM) yang ada di Aceh supaya kebijakan yang dihadirkan telah melalui proses kajian terlebih dahulu. Dengan demikian, keberadaan UMKM dapat memulihkan keadaan ekonomi mantan kombatan GAM yang dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mereka secara berkelanjutan. Kajian ini dapat dipandang sebagai kebutuhan mendesak sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi mantan kombatan karena jika diabaikan akan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja sebagai implikasi dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang berdampak pada instabilitas sosial.

METODE

Kajian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan fokus utama adalah kombatan GAM yang menjalankan usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi literatur. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, sementara data penunjang didapat dari kajian terhadap dokumen dan literatur yang relevan dengan topik. Penulis melakukan pengamatan di lokasi keberadaan UMKM dan melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM dari mantan kombatan. Dalam hal ini, penulis mendatangi UMKM yang pengelolanya melibatkan mantan kombatan GAM dengan terlebih dahulu menjajaki informasi awal dari masyarakat dan informan penghubung. Hal ini dilakukan agar peneliti tidak salah dalam menentukan informan.

Tentu saja, kajian ini tidak bermaksud untuk melahirkan kesimpulan yang sifatnya general sehingga hasil kajian tidak dapat merepresentasikan kondisi seluruh UMKM yang pengelolanya adalah mantan kombatan. Akan tetapi, kajian ini sebagai ruang diskusi yang dapat menggali pemahaman (*verstehen*) yang tentu saja akan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan praktek perumusan kebijakan (*policy making process*). Selanjutnya, data dianalis dengan model interaktif, yaitu melalui tahapan reduksi data, kategorisasi data dan penyajian data yang pada berakhir pada penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM dan Sekelumit Kisah Dunia Usaha Eks Kombatan

Ragam Defenisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bukan saja di negara berkembang, tetapi juga berlaku di negara maju. Untuk kasus Indonesia sendiri, UMKM mampu menjadi solusi ketidakstabilan ekonomi kala krisis keuangan terjadi tahun 1997 dan krisis global pada 2008 silam (Tyas & Safitri, 2014). Badan usaha tersebut berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja serta pendistribusian hasil pembangunan (Kristiyanti, 2012). Oleh sebab itu, tidak mengherankan ketika David Mclelland menyebutkan bahwa sebuah negara masuk dalam kategori makmur apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah populasi penduduknya. Karakteristik wirausahaan yang sukses adalah mereka lebih proaktif, mereka sudah melakukan sesuatu sebelum mereka harus melakukannya; mereka menunjukkan karakteristik sindrom motivasi berprestasi; dan mereka memiliki komitmen terhadap orang lain (McClelland, 1987).

 https://doi.org/10.35308/xxxxx

UMKM sendiri memiliki defenisi yang beragam. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UKM berdasarkan jumlah kuantitas tenaga kerja. Jika jumlah pekerja berkisar antara 2 sampai 19 orang, maka masuk dalam kategori usaha kecil. Sementara usaha menengah jika jumlah tenaga kerja berada di angka 20 sampai dengan 99 orang (Winarni, 2019). Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, defenisi UMKM dijelaskan sebagai berikut:

> "1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan; 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan" (Suci, 2017).

Selanjutnya, undang-undang tersebut menyebutkan kriteria UMKM pada pasal 6 sebagai berikut:

> "1) Kategori usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil jualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2) Kriteria Usaha Kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selain kekayaan tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan di angka Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan 3) kategori Usaha Menengah adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)".

Menurut Burns (2016) perusahaan kecil adalah entitas sosial yang berputar di sekitar hubungan pribadi. Mereka mendekati risiko dan ketidakpastian dengan cara tertentu yang kadang-kadang mungkin tampak jauh dari rasional. Karakteristik lainnya adalah mereka biasanya kekurangan uang tunai. Mereka tidak dapat mengumpulkan modal dengan cara yang sama seperti perusahaan besar. Kemudian perusahaan kecil cenderung beroperasi dalam satu pasar tunggal, atau sejumlah pasar terbatas, mungkin menawarkan sejumlah produk atau layanan terbatas. Menurut Harini, Sudarijati, and Ashari (2016) untuk meningkat kinerja UMKM diperlukan keterlibatan para stakeholders seperti lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi, dan asosiasi usaha. Merujuk pada berbagai defenisi di atas, maka kelompok usaha yang dibangun oleh mantan eks kombatan yang penulis dapatkan di lapangan bisa digolongkan ke dalam UMKM.

Sekelumit Kisah Usaha Mantan Kombatan GAM di Aceh Utara

Perjanjian perdamaian (MoU Helsinki) pada 2005 menyelesaikan konflik politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia secara formal. Paska damai, pembangunan perdamaian yang tidak tepat telah menimbulkan konflik horizontal di Aceh; konflik antar mantan elit GAM; konflik antar elit dan mantan prajurit; dan di antara kelompok masyarakat yang terbagi menurut garis etnis dan garis ekonomi (Ansori, 2012; Barron et al., 2013; Quayle). Namun demikian, harus diakui, damai Aceh yang sudah berlansung selama satu setengah dekade berdampak pada pertumbuhan ekonomi, walaupun dipandang lambat.

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mengarah pada pengurangan kemiskinan yang berkontribusi pada perdamaian. Oleh sebab itu, tidak dapat disangkal bahwa kemampuan bisnis untuk menghasilkan peluang kerja dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang mampu mencegah konflik terulang lagi (Chang & Rynhart, 2016). Salah satu jalan untuk pertumbuhan ekonomi adalah melalui pengembangan kewirausahaan.

Mantan eks kombatan merintis usaha dengan modal yang berasal dari individu dan bantuan pemerintah. Hanya saja, UMKM yang dibangun oleh eks kombatan dengan modal yang bersumber dari eksternal kelompok (bukan bersifat swadaya) sering berujung dengan kegagagalan. Sebagaimana dua UMKM di wilayah Aceh Utara yang dinakhodai oleh mantan eks kombatan berikut ini. Pertama, UMKM "Muda Mandiri" yang bergerak di bidang usaha pertanian bawang merah dan cabai di Desa Riseh Tunong, Aceh Utara. Kelompok tersebut dibentuk oleh mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka pada awal tahun 2020. Pendirinya adalah Muhazir dan Abdurrahman. Anggota kelompok terdiri dari masyarakat korban konflik, sementara pengelolanya adalah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut pengelola UMKM, modal awal pembentukan kelompok ini didapat dari program bantuan pemerintah melalui alokasi dana Dewan Perwakilan Rakyar Aceh (DPRA). Kelompok ini hanya berjalan selama satu tahun dan kemudian hilang tak berjejak.

Kedua, Kelompok Usaha Penggemukan Kambing di Gampong Lang Nibong Matang Sijuek Barat, Kabupaten Aceh Utara. Kelompok ini mendapatkan bantuan dari Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara. Bantuan yang diberikan berupa ternak kambing untuk penggemukan. Kelompok yang lahir pada tahun 2018 juga dikelola oleh mantan kombatan GAM dan masyarakat biasa. Terdapat sekitar 20 anggota kelompok yang terdaftar di bawah kelompok "Makmu Ternak" tersebut. Setiap anggota kelompok menerima bantuan 2 ekor kambing jantan. Dalam pelaksanaannya, kelompok ini mendapat bimbingan petugas yang didatangkan dari dinas terkait selama tiga hari. Permasalahannya, ketika bibit kambing diberikan, para anggota ini mengaku menerima kambing di bawah standar penggemukan. Jelas, para anggota kelompok kecewa dengan mekanisme bantuan seperti ini. Apalagi mereka hanya menerima kambing saja, tanpa ada biaya operasional lainnya yang juga diperlukan selama proses penggemukan, seperti obat-

obatan, pakan, dan perawatan kandang yang semuanya membutuhkan biaya tambahan. Dalam perjalanannya, kambing yang menjadi cikal bakal bantuan ini ada yang menderita sakit, bahkan mengalami kematian. Menurut pendamping bantuan, bantuan bibit kambing yang diberikan hanya bertahan dua bulan, setelah itu sudah tidak ditemukan lagi, baik karena faktor kematian, maupun dijual oleh penerima bantuan.

Dari dua cerita usaha di atas, dapat dijelaskan bahwa gagalnya pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dlatarbelakangi oleh beberapa faktor berikut ini: 1) Terbatasnya modal yang diberikan; 2) Minimnya sumber daya manusia terkait pengelolaan usaha yang diberikan; 3) Bantuan yang diberikan tidak melalui kajian sehingga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan *passion* penerima; 4) Infrastruktur usaha yang tidak mendukung; 5) Pengelola yang tidak disiplin sehingga tidak memiliki rasa tangung jawab terhadap bantuan yang diterima; 6) Lemahnya kontrol dan evaluasi dari pihak pemberi bantuan; dan 7) Lemahnya jaringan pemasaran yang dimiliki. Untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalisasi kegagalan, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan kebijakan terkait tata kelola UMKM.

Urgensi Riset UMKM di Aceh dalam Perspektif Studi Perdamaian

Sebagian mantan aktor konflik kelas menengah dan kelas bawah telah bertransformasi menjadi pengusaha kecil dan menengah bersama masyarakat kreatif lainnya di desa mereka. Namun demikin, belum terlihat adanya penelitian yang fokus pada keterlibatan mantan aktor konflik sebagai pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di antara penelitian yang berkaitan dengan UMKM yang memfokuskan pada aspek ekonomi, yaitu penelitian Hafni and Rozali (2015) yang berjudul "Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia"; Penelitian Affiqah and Fuadi (2019) dengan judul "Penerapan Metode Target Costing dalam Perencanaan Biaya Produksi untuk Optimalisasi Laba pada UMKM Dendeng Sapi Aceh di Banda Aceh"; penelitian Bahri and Rahmawaty (2019) yang mengangkat tema "Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dalam Menentukan Harga Jual Produk (Studi Empiris Pada UMKM Dendeng Sapi di Banda Aceh)"; Fadzillah (2019) dengan judul "Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM"; Kajian Maulina (2020) dengan judul "Analisis Faktor Determinan Minat Muslimpreneur dalam Menjalankan UMKM di Banda Aceh"; Riset Murezeki (2017) dengan tema "Analisis Peningkatan dan Pengembangan Produksi Kopi dari Pasca Panen di UMKM "Bergendaal Koffie" Kabupaten Bener Meriah Aceh"; kajian Nasir, Putri, Lianti, and Dewi (2018) "Produk Unggulan dan Implimentasinya di Kabupaten Aceh Utara"; Ridha and Putri (2017) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kerajinan Tas Aceh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara; Yusrilsya and Mahalli (2013) Peranan CSR PT. Arun NGL dalam Pengembangan UKM di Aceh Utara"; dan kajian yang dilakukan oleh Jullimursyida (2018) dengan judul "Pembentukan Klaster Bisnis dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Komoditi Karet di Kabupaten Aceh Utara".

Jika ditelusuri lebih lanjut, kajian-kajian tersebut tidak ada yang menjelaskan keterlibatan mantan aktor konflik dalam UMKM. Selain itu, penelitian-penelitian mengenai UMKM sebelumnya lebih menfokuskan pada produksi, pemasaran serta laba dan penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi. Akibatnya, kajian UMKM di Aceh telah didominasi oleh perspektif ekonomi, dan belum terdapat kajian yang fokus pada pengembangan UMKM yang dilakukan oleh mantan aktor konflik. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi mantan GAM, di antaranya penelitian Yunus, Zainal, Jalil, and Abubakar (2015) yang berjudul "*Local Economic Empowerment* of the *Ex - GAM* (*Gerakan Aceh Merdeka / Free Aceh Movement Former Combatant*) *and Conflict Victims through* Palm Oil Plantation Aid *Program in East Aceh*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Bantuan Kelapa Sawit di Aceh Timur diperuntukkan kepada kelompok yang terdiri dari mantan GAM, masyarakat korban konflik dan masyarakat biasa. Program ini telah berdampak positif pada peningkatan ekonomi lokal, terutama pendapatan petani dan masyarakat sekitar lahan perkebebunan.

Selanjutnya Ridhwan, Fauzi, and Daud (2015) dalam kajiannya "Transisi Ekonomi Politik GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM" yang menyatakan bahwa pada masa *peace making*, pendapatan mereka dihasilkan dari sumbangan suka rela masyarakat, *pajak nanggroe*, sumbangan pengusaha (enterpreneur) serta dari pejabat. Pada fase *peace keeping* sebagian mereka mendapat pendapatan dari pekerjaan sebagai repsentatif dari GAM di AMM, dan sebagian lainnya mendapat bantuan dari pemerintah sebagai kompensasi damai Aceh. Selanjutnya pada masa *peace building* mereka memperoleh ekonomi dari pemberian proyek fisik oleh 'Pemerintahan GAM' serta program pemberdayaan ekonomi melalui koperasi dan LSM, seperti pemberian lahan hutan garap.

Berkaitan dengan koperasi dan lahan garap atau perkebunan, Nazaruddin, Sukmawati, and Nasution (2016) dalam kajiannya "*Reintegration and Socio-Economic Transformation For Ex Combatants of The Free Aceh Movement (GAM) Post-Conflict Era in North Aceh-Indonesia*", menyatakan bahwa lahirnya Koperasi Bumoe Tari sebagai bentuk usaha patungan perkebunan kelapa sawit, disebabkan oleh; tidak adanya program nyata dari Pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan mantan kombatan GAM dan korban konflik; muncul kesadaran kolektif mereka untuk merancang kesejahteraan bagi mereka, korban konflik, anak yatim konfik dan masyarakat marginal; dan panggilan tanggung jawab moral pimpinan GAM wilayah Sagoe. Eksistensi koperasi ini diantaranya ditentukan oleh sistem kepemimpinan yang demokratis, solidaritas dan tanggung jawab yang dibingkai dengan sistem manajemen komando gaya militer GAM.

Sedikit berbeda dengan Nazaruddin, et.al (2016), Tibrani and Ubaidullah (2019) melalui kajiannya "Peran Komite Peralihan Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM", menyebutkan bahwa program kesejahteraan bagi mantan kombatan telah dilaksanakan melalui mekanisme pengembangan ekonomi, pendidikan dan politik di bawah program Komite Peralihan Aceh (KPA). Selain itu, KPA juga berfungsi sebagai mediator antara mantan kombatan GAM dengan elit formal pemerintah dalam hal menjaga kepentingan-kepentingan GAM dan korban konflik Aceh. Hal ini sejalan

 https://doi.org/10.35308/xxxxx

dengan Hajad (2019) dalam kajiannya "Peran Mantan Kombatan GAM dalam Sektor Ekonomi Pasca Konflik", ia menyebutkan bahwa pendapatan ekonomi mantan kombatan GAM setelah konflik diperoleh dengan menjadi *rent seeker* (perantara atau agen) proyek pemerintah. Mereka bekerja dengan memanfaatkan jaringan kekuasaan GAM untuk menuju ke sumber ekonomi, baik itu melalui lobi, negosiasi, dan bahkan intimidasi.

Dari sekian banyak penelitian di atas, tidak ada yang menjelaskan bentuk UMKM yang dikembangkan oleh mantan aktor konflik (GAM), baik dari kalangan kombatan maupun sipil, kecuali Ridhwan *et.al* yang menyinggung sumber ekonomi mantan GAM melalui Koperasi dan LSM, namun mereka tidak menjelaskan koperasi dan LSM apa dan bagaimana usaha yang dijalankan oleh mantan GAM. Sementara Nazaruddin et.al yang menjelaskan secara sepesifik mengenai koperasi fokusnya adalah pada motivasi mantan GAM dalam mengembangkan koperasi. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa belum ada satu kajian yang menjelaskan bentuk-bentuk UMKM yang melibatkan mantan GAM dan pola relasi yang dibangun untuk pengembangan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, kajian-kajian yang bersifat multi disiplin penting untuk dilakukan sebagai usaha menemukan model usaha yang sesuai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mantan aktor konflik. Di samping itu, kajian-kajian yang dilakukan nantinya juga harus dapat menjelaskan pertumbuhan UMKM yang melibatkan bekas aktor konflik Aceh, terutama kajian studi perdamaian yang melibatkan multi disiplin ilmu pengetahuan, dengan menempatkan program ekonomi dalam proses reintegrasi mantan aktor konflik. Jika hanya menggunakan perspektif tunggal, misalnya perspektif sosiologis, kajian yang dihasilkan hanya mampu menganalisis perkembangan UMKM dan pola relasinya dengan para stakeholder. Dengan demikian, dapat diukur perkembangan dan potensi keberlanjutannya secara komprehensif. Penelitian semacam ini dipandang penting sebagai basis kebijakan pemberdayaan ekonomi pasca konflik untuk meminimalisasi pontensi muncul kembali konflik akibat ketimpangan ekonomi dan relasi sosial dalam masyarakat.

Pentingnya Penguatan Kebijakan Kewirausahaan yang Menguatkan Perdamaian

Tidak dapat dibantahkan bahwa UKM mendorong penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, membangkitkan kembali institusi dan membangun kembali ekosistem ekonomi adalah salah satu prioritas pertama rekonstruksi setelah pertempuran berakhir. Menurut U.S. Agency for International Development, 5 persen guncangan ekonomi negatif dapat meningkatkan risiko perang saudara 50 persen di negara-negara rapuh. Walaupun kewirausahaan bukanlah 'obat mujarab' untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi inisiatif yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan — terutama pertumbuhan UMKM — dapat mendorong stabilitas dan pembangunan di negara-negara yang terkena dampak konflik. Oleh sebab itu, bagi mereka yang mempromosikan perdamaian dan kemakmuran, mendukung kewirausahaan dan investasi cerdas dalam pertumbuhan UMKM, adalah satu keharusan dan mesti dijadikan komponen penting dari setiap strategi rekonstruksi pasca perang (Lemmon, 2012).

Tiga kondisi yang mempengaruhi keadaan kewirausahaan pasca konflik, yaitu kondisi sosio-politik, ekonomi dan hukum (Djip, 2014). Untuk itu, secara umum, beberapa kunci kebijakan untuk pembangunan ekonomi, adalah: 1) Kebijakan ekonomi makro yang sehat (kerangka fiskal, moneter, dan peraturan); 2) Penguatan institusi yang dibutuhkan untuk ekonomi pasar yang dinamis; dan 3) Dukungan entitas ekonomi untuk pembangunan sektor swasta. Sementara secara khusus, di negara-negara dalam transisi pasca-konflik, Pemerintah daerah dan lembaga donor dalam merevitalisasi ekonomi lokal yang rusak perlu melakukan kebijakan ekonomi yang dapat: 1) Mengembangkan infrastruktur ekonomi dasar dan mengatur sektor swasta; 2) Mengembangkan pasar kredit; 4) Merangsang investasi asing dan mempromosikan ekspor; dan 4) Mengembangkan sumber daya manusia (Kusago, 2005). Dengan demikian, persoalan atau kesulitan yang sering dihadapi pengusaha (UMKM) untuk tumbuh berkembang dapat teratasi, seperti kesulitan menemukan modal, pasar, dan jaringan yang diperlukan untuk menumbuhkan dan memperluas usaha mereka. Banyak pemilik UMKM juga tidak memiliki keterampilan bisnis dasar, seperti pencatatan, pemasaran, dan penempatan produk (Lemmon, 2012).

Lebih lanjut, secara khusus pengembangan UMKM harus ditempatkan dalam proses reintegrasi jangka panjang untuk menjamin kesejahteraan mantan aktor konflik secara ekonomi, sosial dan politik. Reintegrasi ekonomi dapat berupa memberikan bantuan dan akses ke pekerjaan melalui pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, dukungan usaha mikro, kegiatan pembangunan pedesaan, dan promosi pekerjaan. Ini menyiratkan kemandirian finansial mantan gerilyawan melalui pekerjaan yang produktif dan layak (Office, 2010). Hal ini menjelaskan bahwa UMKM di wilayah bekas konflik berfungsi sebagai mekanisme reintegrasi ekonomi jangka panjang bagi mantan gerilyawan.

Reintegrasi terdiri dari reintegrasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, ini adalah reinsersi. Ini terdiri dari periode awal ketika mantan gerilyawan datang ke bekas keluarga atau komunitas mereka. Seringkali mereka diberikan barang-barang kebutuhan rumah tangga, tanah, suplemen makanan, dan bahan-bahan perumahan. Sedangkan reintegrasi adalah proses yang panjang, untuk memasukkan mantan gerilyawan dan keluarganya ke dalam masyarakat sipil dan mencapai kemandirian finansial melalui kegiatan produktif. Reintegrasi dapat dikategorikan menjadi dua elemen yang saling terkait: sosial dan ekonomi, yang harus berjalan secara paralel. Ada dua pendekatan untuk reintegrasi; obyektif dan luas. Yang pertama adalah menghilangkan potensi ancaman terhadap keamanan publik, berurusan langsung dengan kelompok sasaran mantan gerilyawan dan anggota keluarga mereka dan mungkin termasuk kelompok rentan lainnya seperti pemuda pengangguran, pengungsi internal, dan pengaruh lain yang mengganggu kestabilan masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan komunitas. Ini berkaitan dengan masalah sebagai bagian dari program pembangunan daerah terpadu, rekonstruksi dan reintegrasi. Program tersebut berfokus pada masyarakat dengan persentase penerima manfaat yang besar daripada pada penerima manfaat itu sendiri. (Body & Brown, 2005).

Berdasarkan uraian konseptual tersebut, dapat dipahami bahwa jika pengembangan UMKM yang melibatkan mantan aktor konflik di Aceh dapat dipadukan dalam rencana pembangunan Aceh, maka sangat berpotensi perdamaian Aceh yang negatif segera menuju kepada perdamaian

positif/berkelanjutan dimana keuntungan perdamaian dan kesejahteraan dapat terdistribusi secara adil dan merata. Hal ini sekaligus berfungsi memperbaiki program reintegrasi pada awal perdamaian yang dinilai belum mampu mengkonsolidasi perdamaian Aceh. Diantaranya disebabkan oleh: (1) Ketidakjelasan mengenai tujuan keseluruhan program reintegrasi, yang menyebabkan fokusnya terbatas pada integrasi ekonomi, dan pada keluaran daripada hasil; (2) Terlalu banyak penekanan pada pendekatan reintegrasi individu dan berbasis kompensasi. Pendekatan ini biasanya digunakan hanya untuk periode reinsertion awal; dan (3) Bantuan reintegrasi belum diarusutamakan ke dalam program pemerintah dan donor yang lebih luas, dan ke dalam strategi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sumber daya Pemerintah Aceh yang sangat melimpah belum dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan perdamaian melalui program dan kebijakan pembangunan (Hillman, 2011; Utomo, Hadi, & Nur Djuli, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan perjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dunia usaha UMKM jelas berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam pembangunan perdamaian, UMKM dapat merekoveri ekonomi masyarakat yang rusak akibat konflik. Bahkan melampaui itu, UMKM dapat dijadikan sebagai satu mekanisme lunak untuk mentransformasi aktor konflik menjadi aktor perdamaian. Namun demikian, untuk mengembangkan satu model UMKM yang tepat bagi mantan aktor konflik di Aceh memerlukan satu kajian multidisiplin yang mendalam terlebih dahulu, mengingat banyak kajian selama ini lebih didominasi oleh perspektif ekonomi. Selain itu, kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh dalam melakukan pembangunan ekonomi paska konflik hendaknya mengarusutamakan UMKM yang sensitif damai, di mana struktur dan nilai-nilai ekonomi dapat mendorong keterlibatan mantan aktor konflik dalam pengembangan UMKM yang berkontribusi terhadap pembangunan perdamaian berkelanjutan.

Disamping itu, agar keberadaan UMKM menjadi salah satu media peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka beberapa poin penting berikut ini patut diperhatikan secara komprehensif, yaitu: 1) Kebijakan yang dihadirkan oleh para stakeholder harus berbasis pada kajian riset lapangan terlebih dahulu, sehingga jenis usaha yang diberikan sesuai dengan *passion* dan keahlian penerima bantuan; 2) Pihak pemberi bantuan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga bantuan yang diberikan selalu berada dalam kontrol; 3) Pihak pemberi bantuan harus melakukan pendampingan sehingga sumber daya manusia pengelola juga ikut ter-*upgrade*, dan 4) Meningkatkan rasa saling percaya antar elemen yang berkaitan sehingga terbangun sistem yang kokoh dan terstruktur.

REFERENSI

Affiqah, C., & Fuadi, R. (2019). Penerapan Metode Target Costing dalam Perencanaan Biaya Produksi untuk Optimalisasi Laba pada UMKM Dendeng Sapi Aceh di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *4*(2), 317-324.

Ansori, M. (2012). From insurgency to bureaucracy: Free Aceh movement, Aceh party and the new face of conflict. *Stability: International Journal of Security and Development*, *1*(1).

Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *1*(1), 37-46.

Aspinall, E. (2009). Combatants to contractors: the political economy of peace in Aceh. *Indonesia*(87), 1-34.

Bahri, R., & Rahmawaty, R. (2019). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual Produk (Studi Empiris Pada Umkm Dendeng Sapi Di Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *4*(2), 344-358.

Barron, P., Rahman, E. A., & Nugroho, K. (2013). *The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance: The Case of Aceh, Indonesia*: Asia Foudation.

Body, T., & Brown, S. (2005). Reintegration of ex-combatants through micro-enterprise: An operational framework. *CPR Network: the Pearson Peacekeeping Centre*.

Burns, P. (2016). *Entrepreneurship and small business*: Palgrave Macmillan Limited.

Chang, J. H., & Rynhart, G. (2016). *Enterprise creation, employment and decent work for peace and resilience the role of employer and business membership organizations in conflict zones in Asia*. Retrieved from

Djip, V. (2014). Entrepreneurship and SME development in post-conflict societies. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*.

Fadzillah, N. (2019). *Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM*. UIN Ar-raniry Banda Aceh,

Hafni, R., & Rozali, A. (2015). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (umkm) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan*, *15*(2), 78163.

Hajad, V. (2019). PERAN MANTAN KOMBATAN GAM DALAM SEKTOR EKONOMI PASCA KONFLIK. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, *7*(1), 59-79.

Harini, S., Sudarijati, S., & Ashari, I. (2016). Pengaruh Keterlibatan Stakeholders Terhadap Kinerja Umkm. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, *7*(1).

Hillman, B. (2011). The policy-making dimension of post-conflict governance: the experience of Aceh, Indonesia. *Conflict, Security & Development*, *11*(5), 533-553.

Jullimursyida, G. (2018). Cek Plagiat Buku Referensi; ANALISIS MODEL PEMBENTUKAN KLASTER BISNIS DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KOMODITI KARET DI KABUPATEN ACEH UTARA.

Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. *Majalah Ilmiah Informatika*, *3*(1), 63-89.

Kusago, T. (2005). Post-conflict pro-poor private-sector development: The case of Timor-Leste. *Development in Practice*, *15*(3-4), 502-513.

Lee, T. (2020). Political orders and peace-building: ending the Aceh conflict. *Conflict, Security & Development*, *20*(1), 115-139.

 https://doi.org/10.35308/xxxxx

Lemmon, G. T. (2012). *Entrepreneurship in postconflict zones*: Council on Foreign Relations New York.

Maulina, Y. (2020). ANALISIS FAKTOR DETERMINAN MINAT MUSLIMPRENEUR DALAM MENJALANKAN UMKM DI BANDA ACEH. *ETD Unsyiah*.

McClelland, D. C. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. *The journal of creative behavior*.

Murezeki, Y. W. (2017). Analisis Peningkatan dan Pengembangan Produksi Kopi dari Pasca Panen di UMKM" Bergendaal Koffie" Kabupaten Bener Meriah Aceh.

Nasir, M., Putri, Y. T., Lianti, L., & Dewi, N. (2018). PRODUK UNGGULAN DAN IMPLIMENTASINYA DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *20*(2).

Naudé, W. (2007). *Peace, prosperity and pro-growth entrepreneurship*: WIDER Discussion Paper.

Nazaruddin, M., Sukmawati, C., & Nasution, A. A. (2016). *Reintegration And Socio-Economic Transformation For Ex Combatants Of The Free Aceh Movement (Gam) Post-Conflict Era In North Aceh-Indonesia.* Paper presented at the 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016).

Noor, I. R., & Setyawati, L. (2014). Pemberdayaan UMKM: Catatan Reflektif Hasil Meta Riset. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 39-58.

Office, I. L. (2010). Socio-Economic Reintegration of Ex-combatants: Guidelines. In: ILO Geneva.

Quayle, L. Subnational conflict mitigation and civil society: Networks, innovations, and the uncertain place of ASEAN.

Ridha, A., & Putri, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kerajinan Tas Aceh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *1*(1), 86-93.

Ridhwan, M., Fauzi, F., & Daud, S. (2015). TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM. *Fikiran Masyarakat*, *3*(2), 88-96.

Stange, G., & Patock, R. (2010). From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *29*(1), 95-120.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, *6*(1), 51-58.

Sustikarini, A. (2019). Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, *7*(2), 99-121.

Tibrani, T., & Ubaidullah, U. (2019). Peran Komite Peralihan Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, *4*(4).

Tyas, A. A. W. P., & Safitri, V. I. (2014). Penguatan sektor UMKM sebagai strategi menghadapi MEA 2015. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, *5*(1), 17895.

Utomo, M., Hadi, S., & Nur Djuli, M. (2009). Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh: Multistakeholder Review of Post-conflict Programming in Aceh. *World Bank Group and Dutch Ministry of Foriegn Affairs, Jakarta*.

Winarni, W. (2019). MEMBANGUN PEREKONOMIAN RAKYAT DENGAN KEWIRAUSAHAAN UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Assholeh*, *8*(1), 26-38.

Yunus, S., Zainal, S., Jalil, F., & Abubakar, M. (2015). Local Economic Empowerment of the Ex-Gam (Gerakan Aceh Merdeka/Free Aceh Movement Former Combatant) and Conflict Victims through Palm Oil Plantation Aid Program In East Aceh. *International Journal of Humanities and Social Science*, *5*(10 (1)), 119-124.

Yusrilsya, M., & Mahalli, K. (2013). Peranan CSR PT. Arun Ngl Dalam Pengembangan UKM Di Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, *1*(11), 14768.

Available *online* at: http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy

Jurnal Public Policy

| ISSN (Print) 2477-5738 | ISSN (Online) 2502-0528 |

The Urgency of Research and Strengthening Entrepreneurship Policies in Generating Business Models in Ex-Conflict Areas

Suadi Zainal

Universitas Malikussaleh, Cot Tengku Nie Reuleut Muara Batu, Aceh Utara, Aceh 24351 Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: March24, 2022
Revised: April 25, 2022
Available online: Juli30, 2022

KEYWORDS

Policy, Entrepreneurship, MSMEs, Conflict Actor, Peace

CORRESPONDENCE

Name: *Suadi Zainal*
E-mail:suadi@unimal.ac.id

A B S T R A C T

Entrepreneurship contributes a lot to the economic growth of a regional area. In former conflict areas, entrepreneurship is a mechanism to facilitate prosperity and peace. The involvement of former conflict actors in micro, small and medium enterprises (MSMEs) provided them opportunities to enjoy peace dividends and repair the order of life damaged by prolonged conflict. Even so, failure of MSMEs become a problem because it causes economic stagnation and has the opportunity to create new conflict. Therefore, this paper aims to analyze the importance of research and strengthening policies related to entrepreneurship in former conflict areas. This study was conducted in Aceh Utara District using a qualitative approach. The data collection process carried out observation, interviews, and document studies. The empirical facts were analyzed by the stage of data reduction and data categorization, data display, and conclusion. The results showed that one of the causes of failure in MSMEs developments is weak policies and regulations related to community business empowerment. This fact was raised because the policies presented by the stakeholders were not based on research. Indeed, strengthening policies related to MSMEs can be done by making the results of studies and social mapping the primary basis for policymaking. Thus, the development of the MSMEs model for former conflict actors in Aceh has effects on increasing welfare and maintaining sustainable peace.

INTRODUCTION

In many areas of the former conflict, entrepreneurship is seen as a mechanism to facilitate prosperity and peace (Naudé, 2007). Understanding the crucial role of entrepreneurship, the Aceh Government through the regional planning agency has compiled a Roadmap for the Regional Innovation System. Among the important actions in this innovation is the presence of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Its existence has a strategic role in encouraging economic growth and reducing the number of unemployed. For this reason, the local government is required to develop and strengthen the integration of increasing MSMEs resources (Zainal & bin Abubakar, 2021) so that it can provide satisfactory economic benefits to its members and be competitive in facing local and global market competition.

The growth of Aceh's MSMEs continues to increase every year. This is inseparable from the peaceful situation in Aceh, and the many stimulants of economic empowerment assistance provided by the government and donor agencies to the people of Aceh, especially for former combatants of the Free Aceh Movement (GAM) and conflict victims. Some elite actors of the conflict have transformed into political elites (Stange & Patock, 2010), contractors as well as rent seekers to obtain post-conflict economic gains (Aspinall, 2009; Hajad, 2019). This condition has implications for the creation of a patronage system controlled by former combatants in various development and economic programs (Barron, Rahman, & Nugroho, 2013; Lee, 2020). On the other hand, there are also many former combatants and civil society who have difficulty accessing assistance from development programs that are disbursed due to limited political relations. Thus, the peace dividend is not felt equally and functions optimally in reducing poverty and injustice in Aceh (Sustikarini, 2019).

The patronage system of economic and political development is still being practiced so that even though so much business capital is provided, it still has no significant effect on reducing poverty. At some level, there are even many groups of combatants who get access to capital assistance but fail to develop their businesses. One of the reasons is the weak policies and regulations related to community business empowerment. This fact arises because the policies presented by stakeholders in Indonesia are generally not based on research results. The results of studies and research have not been the main considerations in producing policies. The tug-of-war between policy-making actors, be it political or economic interests, still dominates the cycle and process of creating the policy itself. Actually, superior policies related to public affairs must be born from research conducted in-depth (Asmara, 2016).

Many factors cause the wide gap between the world of research and policy, including (1) The understanding and awareness of policymakers who are still lacking regarding the importance of the existence of research in the policy-making process; (2) A false perception of the research itself, as if the world of research is only related to the academic world; (3) Limited research results that are worthy of reference by policymakers, both in quality and quantity; (4) So far, most studies have only been complementary to formality procedures in producing policies; (5) The results of the research conducted

https://doi.org/10.35308/jpp.v8i2.4383
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Some rights reserved

have not been properly inventoried so that they are difficult to access; and (6) Lack of dissemination of information on research results to policy formulation parties (Noor & Setyawati, 2014). This tendency has implications for weak substance and policy implementation on the ground.

This study is considered important as a trigger for scientific discussions among entrepreneurial policy stakeholders (MSMEs) in Aceh so that the policies presented have gone through a review process first. Thus, the existence of MSMEs can restore the economic situation of former GAM combatants who can sustainably meet their basic economic needs. This study can be viewed as an urgent need as a solution to the economic problems of former combatants because if ignored it will become a time bomb that can explode at any time as an implication of social and economic inequality that has an impact on social instability.

METHOD

This study was conducted in the Aceh Utara Regency with the main focus being GAM combatants who run MSME businesses. This research uses a qualitative approach with observational data collection techniques, interviews, and literature studies. Observations and interviews were conducted to collect primary data while supporting data were obtained from the study of documents and literature relevant to the topic. The author made observations at the location of the existence of MSMEs and conducted interviews with several MSME actors from former combatants. In this case, the author went to MSMEs whose managers involved former GAM combatants by first exploring preliminary information from the public and liaison informants. This is done so that the researcher is not mistaken in determining the informant.

Of course, this study does not intend to produce general conclusions so the results of the study cannot represent the condition of all MSMEs whose managers are former combatants. However, this study is a discussion space that can explore understanding (verstehen) which of course will be useful for scientific development and policy-making process practices. Furthermore, the data is analyzed with an interactive model, namely through the stages of data reduction, data categorization, and data presentation which ends in concluding.

RESULTS AND DISCUSSION

MSMEs and a Brief Story of the Former Combatant Business

Variety of MSMEs Definitions

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economic empowerment of the lower middle class. Not only in developing countries, but also in developed countries. In the case of Indonesia itself, MSMEs were able to become a solution to economic instability during the financial crisis in 1997 and the global crisis in 2008 (Tyas & Safitri, 2014). These business entities play a strategic role in national economic development through the absorption of labor and the distribution of development products (Kristiyanti, 2012). Therefore, it is not surprising when David Mclelland mentioned that a country falls into the category of the prosperous if it has entrepreneurs as much as 2% of its population. The characteristic of successful entrepreneurs is that they are more proactive, they have already done something before they have to do it; they show characteristics of the motivational syndrome of achievement; and they commit to others (McClelland, 1987).

MSMEs have various definitions. The Central Statistics Agency (BPS) defines SMEs based on the quantity of labor. If the number of workers ranges from 2 to 19 people, then it falls into the category of small businesses. Meanwhile, medium-sized businesses, if the number of workers is 20 to 99 people (Winarni, 2019). Referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, the definition of MSMEs is explained as follows: "(1) Micro Enterprises are productive businesses owned by individuals and/or individual business entities; (2) Small Business is a productive economic business that stands alone, carried out by an individual or business entity that is not a subsidiary or not a branch of a company that is owned, controlled, or is part either directly or indirectly of a medium-sized business or large business. (3) Medium Enterprises are productive economic enterprises that stand alone, carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries or branches of companies that are owned, controlled, or part either directly or indirectly with small businesses or large businesses with a total net worth or annual sales proceeds" (Suci, 2017).

Furthermore, the law states the criteria for MSMEs in article 6 as follows: "(1) The micro business category is those with a maximum net worth of Rp. 50,000,000.00 (fifty million), excluding land and buildings for business premises and have a maximum annual sales of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million); (2) The criteria for Small Businesses are those with a net worth of more than Rp. 50,000,000.00 (fifty million) and a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million), in addition to the wealth of land and buildings for business premises and annual sales proceeds of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million) up to Rp. 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million); and (3) the Medium Enterprise category has a net worth of more than Rp. 500,000,000.00 (five hundred million) up to Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion), excluding land and buildings for business premises; and has annual sales of more than Rp. 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million) up to a maximum of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion)".

According toBurns (2016)), a small company is a social entity that revolves around personal relationships. They approach risks and uncertainties in a certain way that may sometimes seem far from rational. Another characteristic is that they are usually short of cash. They can't raise capital in the same way as big companies. Then small companies tend to operate in one single market or a limited number of markets, perhaps offering a limited number of products or services. According toHarini, Sudarijati, and Ashari (2016), to improve the performance of MSMEs, the involvement of stakeholders such as educational institutions, financial institutions, cooperatives, and business associations is needed. Referring to the various definitions above, the business group built by former combatants that the author got in the field can be classified into MSMEs.

A Brief Story of the Former GAM Combatant's Business in Aceh Utara

The 2005 peace agreement (MoU Helsinki) formally resolved the political conflict between the Free Aceh Movement

 https://doi.org/10.35308/jpp.v8i2.4383

(GAM) and the Government of Indonesia. Post-peace, improper peacebuilding has led to horizontal conflicts in Aceh; conflicts between former GAM elites; conflicts between elites and former soldiers; and among groups of people divided according to ethnic lines and economic lines (Ansori, 2012; Barron et al., 2013; Quayle). However, it must be admitted that Aceh's peace, which has been going on for a decade and a half, has had an impact on economic growth, although it is seen as slow.

Good economic growth will lead to a reduction in poverty that contributes to peace. Therefore, it is undeniable that the ability of businesses to generate job opportunities can promote economic and social development capable of preventing conflicts from recurring again (Chang & Rynhart, 2016). One of the paths to economic growth is through the development of entrepreneurship.

The former combatant started a business with capital derived from individuals and government assistance. It's just that MSMEs built by ex-combatants with capital sourced from external groups (not self-help) often fail. Like the two MSMEs in the Aceh Utara region who were captained by the following former combatants. First, MSMEs "Muda Mandir" was engaged in onion and chili farming in Riseh Tunong Village, Aceh Utara. The group was formed by former Combatants of the Free Aceh Movement in early 2020. Its founders were Muhazir and Abdurrahman. The group's members consist of conflict victims, while the manager is a former member of the Free Aceh Movement (GAM). According to MSME managers, the initial capital for the formation of this group was obtained from government assistance programs through the allocation of funds from the Aceh Representative Council (DPRA). This group only ran for a year and then disappeared unstoppable.

Second, the Goat Fattening Business Group in Gampong Lang Nibong Matang Sijuek Barat, Aceh Utara Regency. This group received assistance from the Investment, Transmigration, and Manpower Office of Aceh Utara Regency. The assistance provided was in the form of goats for fattening. The group, which was born in 2018, is also managed by former GAM combatants and ordinary people. There are about 20 members of the group listed under the "Makmu Ternak" group. Each member of the group received the help of 2 male goats. In its implementation, this group received the guidance of officers who were brought in from the relevant service for three days. The problem is when goat breeds are given, these members claim to receive goats below fattening standards. The members of the group were disappointed with this kind of relief mechanism. Moreover, they only accept goats, without any other operational costs that are also needed during the fattening process, such as medicines, feed, and stall maintenance, all of which require additional costs. Along the way, the goats that became the forerunners of this assistance suffered from illness and even experienced death. According to the aid companion, the goat breed assistance provided lasted only two months, after which it was no longer found, either due to the death factor, or sold by the beneficiaries.

From the two business stories above, it can be explained that the failure of economic empowerment through MSMEs is motivated by the following factors: (1) Limited capital provided; (2) Lack of human resources related to the management of the business provided; (3) The assistance provided is not through a study so that it is not on target and not in line with the recipient's passion; (4) Unsupportive business infrastructure; (5) Managers who are not disciplined so that they do not have a sense of responsibility for the assistance received; (6) Weak control and evaluation on the part of the aid provider; and (7) Weak marketing networks. To correct weaknesses and minimize failures, one of the things that can be done is to strengthen policies related to MSME governance.

The Urgency of MSMEs Research in Aceh in the Perspective of Peace Studies

Some former middle-class and lower-class conflict actors have transformed into small and medium-sized entrepreneurs alongside other creative communities in their villages. However, there has been no research that focuses on the involvement of former conflict actors in MSMEs to improve economic welfare. Among the researches related to MSMEs that focus on economic aspects, were the research of Hafni and Rozali (2015) that entitled "Analysis of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) on Employment in Indonesia"; the research of Affiqah and Fuadi (2019) entitled "Application of the Target Costing Method in Production Cost Planning for Profit Optimization in Aceh Beef Jerky MSMEs in Banda Aceh"; research by Bahri and Rahmawaty (2019) with the theme "Analysis of Determining Cost of Goods Produced in Determining The Selling Price of Products (Empirical Study on Beef Jerky MSMEs in Banda Aceh)"; Fadzillah (2019) with the title "Strategy of the SME Cooperatives and Trade Office of Banda Aceh City in Increasing the Development of Creative Industries for MSMEs"; Maulina (2020) with the title "Analysis of Determinants of Muslimpreneur Interest in Running MSMEs in Banda Aceh"; Murezeki (2017) with the theme "Analysis of Increasing and Developing Coffee Production from Post-Harvest in MSMEs "Bergendaal Koffie" Bener Meriah Aceh Regency"; the study of Nasir, Putri, Lianti, and Dewi (2018) "Superior Products and Their Implimentation in North Aceh Regency"; Ridha and Putri (2017) "Factors Affecting the Income of Aceh Bag Handicraft Business in Ulee Madon Village, Muara Batu District, Aceh Utara Regency; and the study conducted by Yusrilsya and Mahalli (2013) The Role of CSR PT. Arun NGL in the Development of SMEs in Aceh Utara".

If explored further, none of these studies explain the involvement of former conflict actors in MSMEs. In addition, previous research on MSMEs focused more on production, marketing as well as profit and employment from an economic perspective. As a result, the study of MSMEs in Aceh has been dominated by an economic perspective, and there has been no study that focuses on the development of MSMEs conducted by former conflict actors. However, there are several studies related to the economic empowerment of the former GAM, including the research of Yunus, Zainal, Jalil, and Abubakar (2015) entitled "Local Economic Empowerment of the Ex-GAM (Free Aceh Movement Former Combatant) and Conflict Victims through Palm Oil Plantation Aid Program in Aceh Timur". This study concluded that the Palm Oil Assistance Program in Aceh Timur was intended for groups consisting of former GAM, conflict victims, and civil society. This program has had a positive impact on improving the local economy, especially the incomes of farmers and communities around plantation land.

Furthermore,Ridhwan, Fauzi, and Daud (2015) in their study "Gam's Political Economy Transition: A Study of the Development Direction of the Free Aceh Movement" states that during the peace-making period, their income was generated

from community voluntary donations, taxes, donations from entrepreneurs and officials. In the peacekeeping phase, some of them earned income from work as representatives from GAM at AMM, and others received assistance from the government as compensation for Aceh's peace. Furthermore, during the peace-building period, they gained the economy from the provision of physical projects by the 'GAM Government' as well as economic empowerment programs through cooperatives and NGOs, such as the granting of arable forest land.

Regarding cooperatives and arable land or plantations, Nazaruddin, Sukmawati, and Nasution (2016) in their study "Reintegration and Socio-Economic Transformation For Ex Combatants of The Free Aceh Movement (GAM) Post-Conflict Era in Aceh Utara-Indonesia", stated that the birth of the Bumoe Tari Cooperative as a form of oil palm plantation joint venture, was caused by: the absence of a real program from the government to achieve the welfare of former combatants GAM and victims of conflict; arose their collective consciousness to design welfare for them, victims of conflict, orphans and marginalized societies; and the call for the moral responsibility of GAM leaders in the Sagoe region. The existence of this cooperative is determined, among other things, by a democratic leadership system, solidarity, and responsibility framed with the GAM's military-style command management system.

Slightly different from Nazaruddin, et.al (2016), Tibrani and Ubaidullah (2019)) in their study "The Role of the Aceh Transitional Committee in Improving the Economic Welfare of Former GAM Combatants", mentioned that welfare programs for former combatants have been implemented through economic, educational, and political development mechanisms under the Aceh Transition Committee (KPA) program. In addition, the KPA also serves as a mediator between former GAM combatants and the formal government elite in terms of safeguarding the interests of the GAM and victims of the Aceh conflict. This is in line with Hajad (2019) in his study "The Role of Former GAM Combatants in the Post-Conflict Economic Sector", he mentioned that the economic income of former GAM combatants after the conflict was obtained by becoming rent seekers (intermediaries or agents) of government projects. They work by leveraging GAM's power network to get to economic resources, be it through lobbying, negotiation, and even intimidation.

From the many studies above, no one explains the form and development of MSMEs of former conflict actors (GAM), both from combatants and civilians, except Ridhwan et.al who alluded to the economic resources of the former GAM through cooperatives and NGOs, but they did not explain what cooperatives and NGOs were, as well as how the businesses were run by the former GAM. While Nazaruddin et.al explained specifically about cooperatives, their focus was on the motivation of the former GAM in developing cooperatives. Thus, it is seen that there has not been a study that explains the forms of MSMEs involving the former GAM and the relationship patterns built for the development of MSMEs.

Based on the description above, multi-disciplinary studies are important to be carried out to find an appropriate business model for increasing the economic growth of former conflict actors. In addition, the studies carried out later must also be able to explain the growth of MSMEs involving former Aceh conflict actors, especially peace studies involving multi-disciplinary sciences by placing economic programs in the process of reintegration of former conflict actors. If only use a single perspective, for example, a sociological perspective, the resulting study is only able to analyze the development of MSMEs and their relationship patterns with stakeholders. Thus, it can be comprehensively measured its development and sustainability potential. This kind of research is seen as important as a basis for post-conflict economic empowerment policies to minimize the potential for conflicts to re-emerge due to economic inequality and social relations in society.

The Importance of Strengthening Entrepreneurship Policies for Peace

It is indisputable that SMEs encourage job creation and economic development. Therefore, reviving institutions and rebuilding economic ecosystems is one of the priorities of reconstruction after the battle ends. According to the U.S. Agency for International Development, a five percent negative economic shock could increase the risk of a civil war by 50 percent in fragile countries. Although entrepreneurship is not a 'panacea' for economic growth, initiatives that support entrepreneurial growth — especially the growth of MSMEs — can promote stability and development in conflict-affected countries. Therefore, for those who promote peace and prosperity, as well as support entrepreneurship and smart investment in the growth of MSMEs, it is a must and must be an important component of any post-war reconstruction strategy (Lemmon, 2012).

Three conditions affect the state of entrepreneurship after the conflict, namely socio-political, economic, and legal conditions (Djip, 2014). For this reason, in general, some key policies for economic development are: (1) Sound macroeconomic policies (fiscal, monetary, and regulatory frameworks); (2) Strengthening of the institutions needed for a dynamic market economy, and (3) Support of economic entities for private sector development. While specifically in countries in post-conflict transition, local governments and donor agencies in revitalizing the damaged local economy need to carry out economic policies that can: (1) Develop basic economic infrastructure and regulate the private sector; (2) Develop the credit market; (3) Stimulate foreign investment as well as promote exports; and (4) Developing human resources (Kusago, 2005). Thus, problems or difficulties that are often faced by entrepreneurs (MSMEs) to grow and develop can be resolved, such as the difficulty of finding the capital, markets, and networks needed to grow and expand their business. Many MSME owners also do not have basic business skills, such as recording, marketing, and product placement (Lemmon, 2012).

Furthermore, in particular, the development of MSMEs must be placed in a long-term reintegration process to ensure the welfare of former conflict actors economically, socially, and politically. Economic reintegration can take the form of providing assistance and access to jobs through job training, skills development, microenterprise support, rural development activities, and job promotion. It implies the financial independence of former guerrillas through productive and decent work (Office, 2010). This explains that MSMEs in the former conflict area serve as a long-term economic reintegration mechanism for former guerrillas.

Reintegration consists of short-term and long-term reintegration. In the short term, this is reinsertion. It consists of

 https://doi.org/10.35308/jpp.v8i2.4383

an early period when former guerrillas came to their former families or communities. Often they are provided with household necessities, land, dietary supplements, and housing materials. Meanwhile, reintegration is a long process to incorporate former guerrillas and their families into civil society and achieve financial independence through productive activities. Reintegration can be categorized into two interrelated elements: social and economic must run in parallel. There are two approaches to reintegration; objective and broad. The first is to eliminate potential threats to public security, dealing directly with target groups of former guerrillas and their family members as well as other vulnerable groups such as unemployed youth, internally displaced people, and other influences that disrupt the stability of society. The second is to develop the community. It deals with issues as part of unified regional development, reconstruction, and reintegration program. The program focuses on communities with a greater percentage of beneficiaries than the beneficiaries themselves (Body & Brown, 2005).

Based on this conceptual description, it can be understood that if the development of MSMEs involving former conflict actors in Aceh can be combined with Aceh's development plan, then it is very potential that negative Aceh peace immediately leads to a positive/sustainable peace where the benefits of peace and prosperity can be distributed fairly and evenly. This also serves to improve the reintegration program at the beginning of peace which is considered unable to consolidate Aceh peace. Among other things, it is caused by: (1) Vagueness regarding the overall objectives of the reintegration program, which causes its focus to be limited to economic integration, and output rather than results; (2) Too much emphasis on individual and compensation-based reintegration approaches. This approach is usually used only for the initial reinsertion period, and (3) Reintegration assistance has not been mainstreamed into broader government and donor programs, nor into strategies to support sustainable regional development and economic growth. Therefore, the Aceh Government's very abundant resources have not been effectively utilized to support peacebuilding through development programs and policies (Hillman, 2011; Utomo, Hadi, & Nur Djuli, 2009).

CONCLUSION

Based on the explanation above, it can be concluded that the MSME functions improve the economic welfare of business actors and the economic growth of a country. In peacebuilding, MSMEs can cover the economy of communities damaged by conflict. Even beyond that, MSMEs can be used as a soft mechanism to transform conflict actors into peace actors. However, to develop one MSME model that is right for former conflict actors in Aceh requires an in-depth multidisciplinary study first, considering that many studies so far have been dominated by an economic perspective. In addition, government policies, especially the Government of Aceh in carrying out post-conflict economic development should mainstream peace-sensitive MSMEs, where economic structures and values can encourage the involvement of former conflict actors in the development of MSMEs that contribute to sustainable peacebuilding.

In addition, for the existence of MSMEs to become one of the media for improving and empowering the community's economy that strengthens peacebuilding, the following important points should be considered comprehensively, namely: (1) The policies presented by stakeholders must be based on field research, so that the type of business provided is following the passion and expertise of the beneficiaries; (2) The granting party shall conduct regular monitoring and evaluation so that the assistance provided is always under control; (3) The assistance provider must assist so that the management's human resources are also upgraded; and (4) Increase mutual trust between related elements so that a solid and structured system is built.

REFERENCES

Affiqah, C., & Fuadi, R. (2019). Penerapan Metode Target Costing dalam Perencanaan Biaya Produksi untuk Optimalisasi Laba pada UMKM Dendeng Sapi Aceh di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4*(2), 317-324.

Ansori, M. (2012). From insurgency to bureaucracy: Free Aceh movement, Aceh party and the new face of conflict. *Stability: International Journal of Security and Development, 1*(1).

Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1*(1), 37-46.

Aspinall, E. (2009). Combatants to contractors: the political economy of peace in Aceh. *Indonesia*(87), 1-34.

Bahri, R., & Rahmawaty, R. (2019). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual Produk (Studi Empiris Pada Umkm Dendeng Sapi Di Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4*(2), 344-358.

Barron, P., Rahman, E. A., & Nugroho, K. (2013). *The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance: The Case of Aceh, Indonesia*: Asia Foudation.

Body, T., & Brown, S. (2005). Reintegration of ex-combatants through micro-enterprise: An operational framework. *CPR Network: the Pearson Peacekeeping Centre*.

Burns, P. (2016). *Entrepreneurship and small business*: Palgrave Macmillan Limited.

Chang, J. H., & Rynhart, G. (2016). *Enterprise creation, employment and decent work for peace and resilience the role of employer and business membership organizations in conflict zones in Asia*. Retrieved from

Djip, V. (2014). Entrepreneurship and SME development in post-conflict societies. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*.

Fadzillah, N. (2019). *Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM*. UIN Ar-raniry Banda Aceh,

Hafni, R., & Rozali, A. (2015). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (umkm) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan, 15*(2), 78163.

Hajad, V. (2019). PERAN MANTAN KOMBATAN GAM DALAM SEKTOR EKONOMI PASCA KONFLIK. *JPP (Jurnal Politik Profetik), 7*(1), 59-79.

Harini, S., Sudarijati, S., & Ashari, I. (2016). Pengaruh Keterlibatan Stakeholders Terhadap Kinerja Umkm. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA, 7*(1).

Hillman, B. (2011). The policy-making dimension of post-conflict governance: the experience of Aceh, Indonesia. *Conflict, Security & Development, 11*(5), 533-553.

Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. *Majalah Ilmiah Informatika, 3*(1), 63-89.

Kusago, T. (2005). Post-conflict pro-poor private-sector development: The case of Timor-Leste. *Development in Practice, 15*(3-4), 502-513.

Lee, T. (2020). Political orders and peace-building: ending the Aceh conflict. *Conflict, Security & Development, 20*(1), 115-139.

Lemmon, G. T. (2012). *Entrepreneurship in postconflict zones*: Council on Foreign Relations New York.

Maulina, Y. (2020). ANALISIS FAKTOR DETERMINAN MINAT MUSLIMPRENEUR DALAM MENJALANKAN UMKM DI BANDA ACEH. *ETD Unsyiah*.

McClelland, D. C. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. *The journal of creative behavior*.

Murezeki, Y. W. (2017). Analisis Peningkatan dan Pengembangan Produksi Kopi dari Pasca Panen di UMKM" Bergendaal Koffie" Kabupaten Bener Meriah Aceh.

Nasir, M., Putri, Y. T., Lianti, L., & Dewi, N. (2018). PRODUK UNGGULAN DAN IMPLIMENTASINYA DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20*(2).

Naudé, W. (2007). *Peace, prosperity and pro-growth entrepreneurship*: WIDER Discussion Paper.

Nazaruddin, M., Sukmawati, C., & Nasution, A. A. (2016). *Reintegration And Socio-Economic Transformation For Ex Combatants Of The Free Aceh Movement (Gam) Post-Conflict Era In North Aceh-Indonesia.* Paper presented at the 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016).

Noor, I. R., & Setyawati, L. (2014). Pemberdayaan UMKM: Catatan Reflektif Hasil Meta Riset. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 39-58.

Office, I. L. (2010). Socio-Economic Reintegration of Ex-combatants: Guidelines. In: ILO Geneva.

Quayle, L. Subnational conflict mitigation and civil society: Networks, innovations, and the uncertain place of ASEAN.

Ridha, A., & Putri, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kerajinan Tas Aceh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika, 1*(1), 86-93.

Ridhwan, M., Fauzi, F., & Daud, S. (2015). TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM. *Fikiran Masyarakat, 3*(2), 88-96.

Stange, G., & Patock, R. (2010). From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 29*(1), 95-120.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos, 6*(1), 51-58.

Sustikarini, A. (2019). Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies), 7*(2), 99-121.

Tibrani, T., & Ubaidullah, U. (2019). Peran Komite Peralihan Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 4*(4).

Tyas, A. A. W. P., & Safitri, V. I. (2014). Penguatan sektor UMKM sebagai strategi menghadapi MEA 2015. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul, 5*(1), 17895.

Utomo, M., Hadi, S., & Nur Djuli, M. (2009). Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh: Multistakeholder Review of Post-conflict Programming in Aceh. *World Bank Group and Dutch Ministry of Foriegn Affairs, Jakarta*.

Winarni, W. (2019). MEMBANGUN PEREKONOMIAN RAKYAT DENGAN KEWIRAUSAHAAN UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Assholeh, 8*(1), 26-38.

Yunus, S., Zainal, S., Jalil, F., & Abubakar, M. (2015). Local Economic Empowerment of the Ex-Gam (Gerakan Aceh Merdeka/Free Aceh Movement Former Combatant) and Conflict Victims through Palm Oil Plantation Aid Program In East Aceh. *International Journal of Humanities and Social Science, 5*(10 (1)), 119-124.

Yusrilsya, M., & Mahalli, K. (2013). Peranan CSR PT. Arun Ngl Dalam Pengembangan UKM Di Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1*(11), 14768.

Zainal, S., & bin Abubakar, M. (2021). *Involvement of Female Ex-Conflict Actors in Micro, Small and Medium Enterprises in Aceh.* Paper presented at the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2020).

 https://doi.org/10.35308/jpp.v8i2.4383

Jurnal PUBLIC POLICY

#5539 Summary

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors	Suadi Zainal
Title	The Urgency of Research and Strengthening Entrepreneurship Policies in Generating Business Models in Ex-Conflict Areas
Original file	5539-15904-1-SM.DOCX 2022-05-26
Supp. files	None
Submitter	Suadi Zainal
Date submitted	May 26, 2022 - 08:10 PM
Section	Articles
Editor	Zuhrizal Fadhly
Author comments	Dear Editor, Hereby I submit my article to be considered for publication in the next issue (July). The results confirm that policy is needed to be formulated based on research for ex-combatants empowerment. Thank you for your kindness Kind Regards, Suadi Zainal
Abstract Views	11

Status

Status	Published Vol 8, No 3 (2022): July
Initiated	2022-08-26
Last modified	2022-09-07

Submission Metadata

Authors

Name	Suadi Zainal
Affiliation	Universitas Malikussaleh
Country	Indonesia
Bio Statement	—

Principal contact for editorial correspondence.

Title and Abstract

Title	The Urgency of Research and Strengthening Entrepreneurship Policies in Generating Business Models in Ex-Conflict Areas
Abstract	Entrepreneurship contributes a lot to the economic growth of a regional area. In former conflict areas, entrepreneurship is a mechanism to facilitate prosperity and peace. The

conflict areas, entrepreneurship is a mechanism to facilitate prosperity and peace. The involvement of former conflict actors in micro, small and medium enterprises (MSMEs) provided them opportunities to enjoy peace dividends and repair the order of life damaged by prolonged conflict. Even so, failure of MSMEs become a problem because it causes economic stagnation and has the opportunity to create new conflict. Therefore, this paper aims to analyze the importance of research and strengthening policies related to entrepreneurship in former conflict areas. This study was conducted in Aceh Utara District using a qualitative approach. The data collection process carried out observation, interviews, and document studies. The empirical facts were analyzed by the stage of data reduction and data categorization, data display, and conclusion. The results showed that one of the causes of failure in MSMEs developments is weak policies and regulations related to community business empowerment. This fact was raised because the policies presented by the stakeholders were not based on research. Indeed, strengthening policies related to MSMEs can be done by making the results of studies and social mapping the primary basis for policymaking. Thus, the development of the MSMEs model for former conflict actors in Aceh has effects on increasing welfare and maintaining sustainable peace.

Indexing

Academic discipline and sub-disciplines	Kebijakan
Keywords	Policy, Entrepreneurship, MSMEs, Conflict Actor, Peace
Language	en

Supporting Agencies

Agencies	—

References

References

Affiqah, C., & Fuadi, R. (2019). Penerapan Metode Target Costing dalam Perencanaan Biaya Produksi untuk Optimalisasi Laba pada UMKM Dendeng Sapi Aceh di Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 317-324.

Ansori, M. (2012). From insurgency to bureaucracy: Free Aceh movement, Aceh party and the new face of conflict. Stability: International Journal of Security and Development, 1(1).

Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 37-46.

Aspinall, E. (2009). Combatants to contractors: the political economy of peace in Aceh. Indonesia(87), 1-34.

Bahri, R., & Rahmawaty, R. (2019). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual Produk (Studi Empiris Pada Umkm Dendeng Sapi Di Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 344-358.

Barron, P., Rahman, E. A., & Nugroho, K. (2013). The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance: The Case of Aceh, Indonesia: Asia Foudation.

Body, T., & Brown, S. (2005). Reintegration of ex-combatants through micro-enterprise: An operational framework. CPR Network: the Pearson Peacekeeping Centre.

Burns, P. (2016). Entrepreneurship and small business: Palgrave Macmillan Limited.

Chang, J. H., & Rynhart, G. (2016). Enterprise creation, employment and decent work for peace and resilience the role of employer and business membership organizations in conflict zones in Asia. Retrieved from

Djip, V. (2014). Entrepreneurship and SME development in post-conflict societies. Journal of Entrepreneurship and Public Policy.
Fadzillah, N. (2019). Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM. UIN Ar-raniry Banda Aceh,

Hafni, R., & Rozali, A. (2015). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (umkm) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Ekonomikawan, 15(2), 78163.

Hajad, V. (2019). Peran Mantan Kombatan Gam Dalam Sektor Ekonomi Pasca Konflik. JPP (Jurnal Politik Profetik), 7(1), 59-79.
Harini, S., Sudarijati, S., & Ashari, I. (2016). Pengaruh Keterlibatan Stakeholders Terhadap

Notice

Privacy Statement

USER

You are logged in as...
suadi76
» My Journals
» My Profile
» Log Out

CERTIFICATE

DOAJ INDEX

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

DOWNLOAD ARTICLE TEMPLATE

DOCX Journal Template

PDF Adobe Journal Template

KEYWORDS

Achievement Motivation, Performance, Work Culture Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Politik Administrasi fiskal Analisis Jaringan Sosial, Kolaborasi, Power Sharing, Stakeholders Mapping Climate Change E-Voting, Policy, Pilkades Effectiveness Facilitator, Government, Household, Poverty Family Hope Program (PKH), Family Welfare, Social Change Forest Governance Health Development, Policy, Sustainability, Governance, COVID-19, Handling

Hanni, S., Sudarijati, S., & Ashari, I. (2016). Pengaruh Keterlibatan Stakeholders Terhadap Kinerja Umkm. Jurnal Sosial Humaniora, 7(1).

Hillman, B. (2011). The policy-making dimension of post-conflict governance: the experience of Aceh, Indonesia. Conflict, Security & Development, 11(5), 533-553.

Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. Majalah Ilmiah Informatika, 3(1), 63-89.

Kusago, T. (2005). Post-conflict pro-poor private-sector development: The case of Timor-Leste. Development in Practice, 15(3-4), 502-513.

Lee, T. (2020). Political orders and peace-building: ending the Aceh conflict. Conflict, Security & Development, 20(1), 115-139.

Lemmon, G. T. (2012). Entrepreneurship in postconflict zones: Council on Foreign Relations New York.

Maulina, Y. (2020). Analisis Faktor Determinan Minat Muslimpreneur Dalam Menjalankan Umkm Di Banda Aceh. ETD Unsyiah.

McClelland, D. C. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. The journal of creative behavior.

Murezeki, Y. W. (2017). Analisis Peningkatan dan Pengembangan Produksi Kopi dari Pasca Panen di UMKM" Bergendaal Koffie" Kabupaten Bener Meriah Aceh.

Nasir, M., Putri, Y. T., Lianti, L., & Dewi, N. (2018). Produk Unggulan Dan Implimentasinya Di Kabupaten Aceh Utara. Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20(2).

Naudé, W. (2007). Peace, prosperity and pro-growth entrepreneurship: WIDER Discussion Paper.

Nazaruddin, M., Sukmawati, C., & Nasution, A. A. (2016). Reintegration And Socio-Economic Transformation For Ex Combatants Of The Free Aceh Movement (Gam) Post-Conflict Era In North Aceh-Indonesia. Paper presented at the 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016).

Noor, I. R., & Setyawati, L. (2014). Pemberdayaan UMKM: Catatan Reflektif Hasil Meta Riset. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 39-58.

Office, I. L. (2010). Socio-Economic Reintegration of Ex-combatants: Guidelines. In: ILO Geneva.

Ridha, A., & Putri, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kerajinan Tas Aceh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1), 86-93.

Ridhwan, M., Fauzi, F., & Daud, S. (2015). TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM. Fikiran Masyarakat, 3(2), 88-96.

Stange, G., & Patock, R. (2010). From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 29(1), 95-120.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. Cano Ekonomos, 6(1), 51-58.

Sustikarini, A. (2019). Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia. JAS (Journal of ASEAN Studies), 7(2), 99-121.

Tibrani, T., & Ubaidullah, U. (2019). Peran Komite Peralihan Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 4(4).

Tyas, A. A. W. P., & Safitri, V. I. (2014). Penguatan sektor UMKM sebagai strategi menghadapi MEA 2015. Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul, 5(1), 17895.

Utomo, M., Hadi, S., & Nur Djuli, M. (2009). Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh: Multistakeholder Review of Post-conflict Programming in Aceh. World Bank Group and Dutch Ministry of Foriegn Affairs, Jakarta.

Winarni, W. (2019). Membangun Perekonomian Rakyat Dengan Kewirausahaan Umkm

Covid-19, Handling Implementation, Policy and Covid-19 Information and Communications Technology Participatory Governance Pekanbaru, Transportation, Busway Pemilu, Partai PDI-P, Calon Legislstif, Aceh Tengah Perception, Service, Certificate of Birth and Death Role of DPRK, Budget, North Aceh Smart City Sustainable Development public policy

VISITORS

Visits 42 842

INFORMATION

» For Readers
» For Authors
» For Librarians

Wiharni, W. (2019). Membangun Perekonomian Rakyat Dengan Kewirausahaan UMKM. Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Assholeh, 8(1), 26-38.

Yunus, S., Zainal, S., Jalil, F., & Abubakar, M. (2015). Local Economic Empowerment of the Ex-Gam (Gerakan Aceh Merdeka/Free Aceh Movement Former Combatant) and Conflict Victims through Palm Oil Plantation Aid Program In East Aceh. International Journal of Humanities and Social Science, 5(10 (1)), 119-124.

Yusrilsya, M., & Mahalli, K. (2013). Peranan CSR PT. Arun Ngl Dalam Pengembangan UKM Di Aceh Utara. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1(11), 14768.

Zainal, S., & bin Abubakar, M. (2021). Involvement of Female Ex-Conflict Actors in Micro, Small and Medium Enterprises in Aceh. Paper presented at the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2020).

Jurnal Public Policy
p-ISSN: 2477-5738 I e-ISSN: 2502-0528 I DOI: 10.35308
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
(0655) 7110535 l +621260313742 l +6285277110911
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License